

**PENGARUH INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP,
DANA BAGI HASIL SDA KEHUTANAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR PERTANIAN DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Digunakan sebagai syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Ekonomi Syariah

OLEH

ZULHIJJAH PUTRI

NIM. 2140200028

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PENGARUH INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP,
DANA BAGI HASIL SDA KEHUTANAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR PERTANIAN DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Digunakan sebagai syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Ekonomi Syariah

OLEH

ZULHIJAH PUTRI

NIM. 2140200028

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PENGARUH INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP,
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR
PERTANIAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Digunakan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH

ZULHIJAH PUTRI
NIM. 2140200028

Pembimbing I

Zulaila Matondang, M.Si
NIP.1983051720233212024

Pembimbing II

Nur Halimah Lubis, M.E
NIDN.2014089301

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal : Lampiran Skripsi
An. Zulhijjah Putri
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Zulhijjah Putri yang berjudul "**Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Bruto di Indonesia**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Zulanka Matondang, M.Si
NIDN.2017058302

Pembimbing II



Nur Halimah Lubis, M.E
NIDN.2014089301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulhijjah Putri
Nim : 21 402 00028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya.

Padangsidimpun, November 2025
Saya yang Menyatakan,



**ZULHIJAH PUTRI
NIM. 21 402 00028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhijjah Putri
Nim : 21 402 00028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian di Indonesia”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : November 2025
Saya yang Menyatakan,



**ZULHIJJAH PUTRI
NIM. 21 402 00028**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Zulhijjah Putri
NIM : 21 402 00028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia

Ketua

Sekretaris

Dr. Sarmiana Batubara, MA
NIDN.2127038601

Dr. Utary Evi Cahyani, MM
NIDN.0621058703

Anggota

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN.2127038601

Dr. Utary Evi Cahyani, M.M
NIDN.0621058703

Zulika Matondang, M.Si.
NIDN.2017058302

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag
NIDN.2026067402

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 2 Desember 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/83,75 (A)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,67
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia**
Nama : **Zulhijjah Putri**
NIM : **21 402 00028**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 15 Desember 2025
Dekan,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Zulhijjah Putri
Nim : 2140200028
Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, namun kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan, kebijakan fiskal, dan mutu sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia periode 2020–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda berbasis data panel, menggunakan data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKLH dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Artinya, peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian di daerah. Sebaliknya, DBH SDA Kehutanan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian, menandakan bahwa pemanfaatannya belum optimal untuk mendukung produktivitas dan pembangunan berkelanjutan. Secara simultan, ketiga variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan lingkungan, pengelolaan dana publik, dan peningkatan kualitas manusia guna memperkuat peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kata kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertanian, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH), Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

ABSTRACT

Name : Zulhijjah Putri
Student ID : 2140200028
Thesis Title : *The Influence of Environmental Quality Index, Revenue Sharing Funds from Forestry Natural Resources, and Human Development Index on the Gross Regional Domestic Product of the Agricultural Sector*

The agricultural sector is an essential pillar of Indonesia's economy; however, its performance is greatly influenced by environmental quality, fiscal policy, and human resource capacity. This study aims to analyze the effects of the Environmental Quality Index (EQI), Revenue Sharing Funds (DBH) from Forestry Natural Resources, and the Human Development Index (HDI) on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural sector in Indonesia during the 2020–2024 period. The research employs a quantitative approach using multiple regression analysis with panel data, based on secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Finance. The results indicate that both EQI and HDI have a positive and significant effect on the agricultural sector's GRDP. This implies that better environmental conditions and higher human resource quality contribute to regional agricultural economic growth. In contrast, the DBH from Forestry Natural Resources shows no significant effect on the agricultural GRDP, suggesting that its utilization has not been optimized to support productivity and sustainable development. Simultaneously, the three variables collectively have a significant impact on the growth of Indonesia's agricultural sector. These findings emphasize the importance of synergy among environmental policy, public fund management, and human resource development to strengthen the agricultural sector's role in national economic development.

Keywords : *Agricultural Gross Regional Domestic Product (GRDP), Environmental Quality Index (EQI), Revenue Sharing Funds (DBH), Forestry Natural Resources, Human Development Index (HDI).*

الملخص

بوتري زلحجة :الاسم

الجامعي الرقم : ٢١٤٠٢٠٠٠٢٨

على البشرية التنمية ومؤشر للغابات، الطبيعية الموارد تقاسم وعائدات البيئة، جودة مؤشر تأثير: البحث عنوان
الزراعة لقطاع الإقليمي الإجمالي المحلي الناتج

والسياسة البيئية بالجودة كبير بشكل يتأثر أدائه لكن ، الإندونيسي الاقتصاد في مهمة ركيزة الزراعي القطاع يعد وصندوق ، (ح ل ك ا) البيئية الجودة مؤشر تأثير تحليل إلى الدراسة هذه تهدف البشرية الموارد وجودة المالية الإجمالي المحلي الناتج على (ا د ح) البشرية التنمية ومؤشر ، (ح ب د) للغابات الطبيعية الموارد إيرادات تقاسم تحليل مع كمي نهج هي المستخدمة الطريقة . ٢٠٢٠-٢٠٢٤ للفترة إندونيسيا في الزراعي للقطاع (ف د غ) الإقليمي الدراسة نتائج تظهر . المالية ووزارة س ف ب من ثانوية بيانات باستخدام ، اللوحة بيانات على بناء المتعدد الانحدار تحسين أن يعني وهذا . الزراعي للقطاع الإجمالي المحلي الناتج على وكبير إيجابي تأثير لهما ا د ح و ح ل ك ا أن لا ، أخرى ناحية من . المنطقة في الزراعي الاقتصادي النمو يشجعان البشرية الموارد قدرة وزيادة البيئة نوعية إلى يشير مما ، الزراعي للقطاع الإجمالي المحلي الناتج على كبير تأثير للغابات الطبيعية للموارد ح ب د ل يكون كبير تأثير لها الثلاثة المتغيرات فإن ، نفسه الوقت في . المستدامة والتنمية الإنتاجية لدعم مثاليا ليس استخدامه أن وإدارة البيئية السياسات بين التآزر أهمية النتائج هذه وتؤكد . إندونيسيا في الزراعي القطاع نمو على البشرية الجودة وتحسين العامة الأموال الوطنية الاقتصادية التنمية عفي القطاع لتعزيز.

الناتج : المفتاحية الكلمات

المواردالموارد عائداتتقاسم البيئة، جودة مؤشر الزراعي، الإقليمي الإجمالي المحلي
الطبيعية البشرية التنمية مؤشر للغابات، الطبيعية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul 'ilmi, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian di Indonesia”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah Lubis, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, S.E. M.A sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Rukiah Lubis, M.Si., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama peneliti menempuh perkuliahan.
5. Ibu Zulaika Matondang, M.Si, selaku Pembimbing I peneliti dan Ibu Nur Halimah Lubis, M.E, selaku Pembimbing II peneliti saya ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan

pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Sarman, dan Ibunda tercinta Rosliana, serta ketiga saudara kandung saya Ahmad Karyadi, Sukriadi dan Anwar Efendi yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi dan cinta tanpa batas dalam setiap langkah perjalanan saya. Kasih sayang dan ketulusan mereka adalah cahaya yang selalu menerangi jalan saya, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari rasa hormat dan terimakasih saya kepada mereka yang selalu berada dibelakang saya, menjadi pilar utama di hidup saya.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang begitu berarti selama masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini. Waktu, peluh, dan cerita yang kita bagi bersama dalam kegiatan organisasi telah banyak membentuk cara saya

berpikir, bertindak, dan belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Semoga kebersamaan kita tetap terjaga, dan langkah kita masing-masing selalu dipenuhi kebaikan.

10. Terakhir untuk Zulhijjah Putri, *last but no last*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Terima kasih sudah berjuang menjadi lebih baik serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga doa, dukungan dan perhatian dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi sempurnanya Skripsi ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapakan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi semua pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Padangsidempuan, 20 Oktober 2025
Peneliti

Zulhijjah Putri
2140200028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s`a	s`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z`al	z`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)



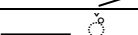
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ا.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	\bar{a}	a dan garis atas
ى.....	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{i}	i dan garis di bawah
و.....	<i>dommah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu:

ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *i Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQOSAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	17
D. Definisi Operasional Variabel	18
E. Perumusan Masalah.....	19
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Teori	22
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian	22
a. Pengertian PDRB Sektor Pertanian.....	22
b. Teori PDRB Sektor Pertanian	27
c. PDRB Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam.....	30
d. Metode Perhitungan PDRB.....	35
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	37

a. Pengertian IKLH	37
b. Teori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42
c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam.....	44
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	46
a. Pengertian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	46
b. Teori DBH-SDA Kehutanan.....	48
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	50
a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia.....	50
b. Teori Indeks Pembangunan Manusia	53
c. Komponen IPM.....	55
d. Metode Perhitungan IPM	58
5. Hubungan Antar Variabel.....	60
B. Penelitian Terdahulu	65
C. Kerangka Pikir.....	69
D. Hipotesis.....	71
BAB III Metode Penelitian	72
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	72
B. Jenis Penelitian	72
C. Populasi dan Sampel.....	73
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
E. Teknis Analisis Data.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN	86
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	86
B. Deskripsi Data Penelitian	88
C. Analisis Data	97
D. Pembahasan Hasil Penelitian	113
E. Keterbatasan Penelitian	122
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Implikasi Hasil Penelitian	124
C. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data PDRB Sektor Pertanian.....	2
Tabel I.2 Data IKLH	6
Tabel I.3 Data DBH SDA Kehutanan	9
Tabel 1.4 Data IPM	13
Tabel I.5 Definisi Operasional Variabel	18
Tabel II.1 Indikator dan Parameter IKLH.....	40
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	65
Tabel III.1 Data Kebakaran Hutan Lahan	70
Tabel IV.1 PDRB Sektor Pertanian Daerah Penelitian.....	89
Tabel IV.2 IKLH Daerah Penelitian	91
Tabel IV.3 DBH SDA Kehutanan Daerah Penelitian	93
Tabel IV.4 IPM Daerah Penelitian	96
Tabel IV.5 Statistik Deskriptif.....	97
Tabel IV.6 Hasil Model Regresi <i>Common Effect</i>	101
Tabel IV.7 Hasil Model Regresi <i>Fixed Effect</i>	101
Tabel IV.8 Hasil Model Regresi <i>Random Effect</i>	102
Tabel IV.9 Hasil Uji Chow	104
Tabel IV.10 Hasil Uji Hausman.....	105
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinieritas	105
Tabel IV.12 Hasil Uji Autokolerasi	106
Tabel IV.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	107
Tabel IV.14 Hasil Uji t-statistik	108
Tabel IV.15 Hasil Uji f-statistik	109
Tabel IV.16 Hasil Uji Regresi Berganda.....	109
Tabel IV.17 Intersept Data Penelitian	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 <i>Envirinmental Kuznet Curva</i>	28
Gambar II.2 Kerangka Pikir	69
Gambar IV.1 Peta Indonesia	86
Gambar IV.2 Uji Normalitas	99
Gambar IV.3 Uji Normalitas.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan usaha pertanian di suatu daerah dalam periode tertentu. Sektor pertanian dalam penghitungan PDRB mencakup semua kegiatan produksi yang berhubungan dengan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Salah satu sumber daya alam terpenting yang dimiliki Indonesia adalah hutan. Hutan Indonesia Mencapai 50% dari total daratan negara dan merupakan salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Hutan sebagai paru-paru dunia yang berperan dalam menjaga siklus hidrologi, mencegah erosi dan menyediakan sumber air bersih.

Hutan di Indonesia menghadapi tantangan yaitu adanya deforestasi yang disebabkan pembukaan lahan untuk pertanian ataupun perkebunan. Secara ekonomis hutan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan luas daratan lebih dari 1,9 juta km² dan lebih dari 270 juta jiwa penduduk, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam

¹ Badan Pusat Statistik, 2023

mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah. Salah satu sektor utama yang masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di daerah, adalah sektor pertanian.²

Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam struktur ekonomi Indonesia. Di tengah pertumbuhan pesat sektor industri dan jasa, sektor pertanian tetap menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sekitar 29% penduduk, terutama di pedesaan dan daerah tertinggal. Sektor ini juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, menyerap tenaga kerja, serta sebagai sumber devisa melalui ekspor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di banyak provinsi juga masih cukup tinggi, meskipun dalam skala nasional cenderung menurun karena pergeseran ke sektor non-tradisional.³

Tabel I.1 Data PDRB Sektor Pertanian se-Provinsi di Indonesia (miliar rupiah)

No	Provinsi	PDRB Sektor Pertanian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	37.899,52	37.768,08	39.005,09	41.626,32	42.121,37
2	Sumatera Utara	136.327,03	141.601,18	148.721,97	153.237,64	158.952,63
3	Sumatera Barat	37.993,39	38.820,71	40.188,63	41.612,83	42.467,74
4	Riau	135.124,21	140.717,74	144.691,04	149.361,11	152.698,39
5	Jambi	39.751,94	41.209,13	43.268,38	45.697,30	47.640,38
6	Sumatera Selatan	53.281,53	54.834,53	56.926,73	58.154,46	59.660,28

² Ardian and Dkk, "Pengaruh Pengembangan Ekonomi Sosial Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Bappenas Working Papers IV* (2023): 21.

³ Bagus Prakoso, "Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH) Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Indonesia (Studi Kasus Pada 13 Provinsi Tahun 2011-2019)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

7	Bengkulu	12.795,99	13.109,72	13.699,33	13.981,68	14.341,27
8	Lampung	68.312,25	68.679,69	69.317,66	69.691,04	68.236,77
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.443,74	16.887,33	18.274,05	19.996,71	21.786,46
10	Kepulauan Riau	5.466,78	5.322,05	5.601,86	5.687,63	5.720,17
11	DKI Jakarta	1.405,10	1.463,34	1.501,26	1.442,05	1.516,60
12	Jawa Barat	107.000,79	108.406,55	113.186,39	113.308,54	115.104,77
13	Jawa Tengah	126.111,76	127.065,84	130.762,52	131.346,27	133.194,10
14	DI Yogyakarta	8.534,64	8.638,19	9.077,78	9.169,84	9.177,04
15	Jawa Timur	167.631,24	170.556,77	173.747,56	177.668,87	177.789,80
16	Banten	25.275,08	25.416,58	26.490,53	26.532,32	26.703,40
17	Bali	21.269,19	21.338,45	21.157,30	21.039,32	21.579,83
18	Nusa Tenggara Barat	21.466,10	21.712,18	22.187,32	8.276,74	22.992,21
19	Nusa Tenggara Timur	18.680,64	19.601,90	20.341,73	20.842,30	21.207,73
20	Kalimantan Barat	32.371,35	33.811,57	34.547,57	35.108,57	36.150,73
21	Kalimantan Tengah	21.304,92	22.073,16	22.834,25	23.837,49	24.148,44
22	Kalimantan Selatan	18.399,41	18.614,34	18.911,08	19.537,27	20.350,74
23	Kalimantan Timur	33.026,69	33.003,90	33.712,58	34.551,17	35.372,74
24	Kalimantan Utara	10.925,64	11.300,51	11.723,08	12.229,93	12.444,24
25	Sulawesi Utara	17.705,45	18.040,14	19.187,16	20.044,50	21.113,98
26	Sulawesi Tengah	42.961,69	46.500,06	51.206,64	54.803,20	59.567,55
27	Sulawesi Selatan	66.139,90	70.357,80	72.162,73	72.226,30	75.166,74
28	Sulawesi Tenggara	21.728,37	22.247,11	23.754,98	24.779,74	25.734,91
29	Gorontalo	10.478,78	10.663,64	10.907,95	11.365,50	11.719,48
30	Sulawesi Barat	12.761,98	12.910,29	13.337,56	13.878,84	14.542,85
31	Maluku	7.353,71	7.409,16	7.833,24	8.276,74	8.557,58
32	Maluku Utara	5.594,84	5.727,23	5.911,57	6.162,71	6.440,92
33	Papua Barat	-	-	-	2.834,43	2.849,11
34	Papua	16.490,61	16.755,83	17.135,86	7.017,87	7.073,68

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel di atas provinsi dengan PDRB sektor pertanian tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Riau

merupakan provinsi dengan kontribusi pertanian tertinggi. Hal ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur yang baik, pemanfaatan teknologi di bidang pertanian, serta akses pasar yang luas sehingga kegiatan pertanian di daerah-daerah ini berjalan lebih optimal. Sebaliknya, Papua mengalami penurunan cukup tajam dalam dua tahun terakhir, yaitu 2023 dan 2024. Penurunan ini kemungkinan terjadi karena adanya pergeseran fokus ekonomi ke sektor lain, perubahan kondisi alam atau iklim, serta persoalan konflik lahan. Sementara itu, wilayah seperti DKI Jakarta dan beberapa provinsi kepulauan, seperti Kepulauan Riau dan Maluku Utara, menunjukkan kontribusi pertanian yang rendah. Hal ini wajar terjadi karena daerah-daerah tersebut lebih fokus pada sektor jasa atau industri dan memiliki keterbatasan lahan pertanian.

PDRB sektor pertanian semakin tinggi, maka artinya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut meningkat. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tumbuh dan berkembang. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia tidak terlepas dari tantangan besar yang bersifat struktural dan ekologis. Salah satu tantangan utama adalah memburuknya kualitas lingkungan hidup. Kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, serta degradasi tanah menjadi persoalan serius yang mengancam keberlanjutan aktivitas pertanian. Untuk mengukur kondisi lingkungan secara nasional dan regional, pemerintah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator. Penurunan IKLH di sejumlah provinsi menjadi

sinyal peringatan bahwa daya dukung alam terhadap aktivitas pertanian semakin menurun, dan hal ini dapat berdampak langsung pada penurunan produktivitas serta kesejahteraan petani.⁴

Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan penopang system kehidupan (*life support system*). Sumber daya alam dan lingkungan sebagai modal alam harus dipergunakan secara berkelanjutan untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan.⁵

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kondisi keberlanjutan dan kesehatan lingkungan yang menjadi penunjang utama aktivitas pertanian. Kualitas lingkungan yang buruk seperti pencemaran air dan degradasi tanah akan berdampak langsung terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Misalnya, deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian yang tidak terkendali telah menyebabkan erosi dan berkurangnya kesuburan tanah di berbagai provinsi di Indonesia, menurunkan hasil pertanian daerah tersebut.⁶

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sangat mempengaruhi pertumbuhan PDRB di sektor pertanian karena sektor ini tergantung pada

⁴ Kurniawan, "Pembangunan Ekonomi Industrialisasi Dan Degradasi Lingkungan Hidup Di Indonesia Eviromental Kunzet Curve Model," *Jurnal Ekonomi* VII. No. 9 (2019): 35.

⁵ Simarmata, *Ekonomi Sumber Daya Alam* (Medan: yayasan Kita menulis, 2021).

⁶ Prakoso, "Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH) Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Di Indonesia (Studi Kasus Pada 13 Provinsi Tahun 2011-2019)."

kualitas lingkungan seperti tanah, air, dan iklim. IKLH yang baik dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan berkontribusi positif terhadap PDRB, sementara kondisi IKLH yang buruk dapat merusak lingkungan pertanian dan menurunkan PDRB. Ada hubungan yang saling terkait antara IKLH dan PDRB sektor pertanian. Kualitas lingkungan sangat penting untuk produktivitas pertanian. Jika IKLH membaik, produktivitas pertanian umumnya juga meningkat, yang kemudian dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.⁷

Tabel I.2 Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup se-Provinsi di Indonesia (dalam %)

No	Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	78,99	74,71	73,55	78,53	74,76
2	Sumatera Utara	69,90	71,15	74,11	72,80	75,05
3	Sumatera Barat	79,33	73,58	74,98	75,85	74,07
4	Riau	69,41	70,72	72,10	70,42	75,97
5	Jambi	70,87	69,04	72,12	68,15	73,16
6	Sumatera Selatan	69,71	69,70	72,12	70,20	75,05
7	Bengkulu	69,92	71,46	70,82	72,10	72,69
8	Lampung	67,46	68,56	69,10	69,91	62,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,50	72,05	71,67	71,62	56,09
10	Kepulauan Riau	70,51	73,19	74,17	74,26	72,69
11	DKI Jakarta	52,98	54,43	54,65	54,57	69,46
12	Jawa Barat	59,40	62,68	64,66	64,77	68,44
13	Jawa Tengah	67,62	66,27	66,85	68,59	71,24
14	DI Yogyakarta	66,65	65,66	65,96	66,29	75,00
15	Jawa Timur	67,07	68,29	69,92	69,59	73,18
16	Banten	59,37	64,14	63,41	62,52	56,39
17	Bali	71,99	70,70	70,89	71,38	75,00
18	Nusa Tenggara Barat	70,83	69,89	70,56	71,92	73,12
19	Nusa Tenggara Timur	73,28	74,97	73,49	74,18	73,18
20	Kalimantan Barat	70,07	72,90	71,90	73,73	72,80
21	Kalimantan Tengah	72,74	75,11	76,62	75,17	74,80

⁷ Izzatul Ummi, "Hubungan Sektor-Sektor Pdrb Dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2012-2021" (Universitas Negeri Semarang, 2019).

22	Kalimantan Selatan	68,43	71,03	71,97	73,50	74,05
23	Kalimantan Timur	76,46	75,06	74,46	75,47	78,59
24	Kalimantan Utara	78,49	80,85	80,67	80,77	75,59
25	Sulawesi Utara	70,69	72,38	72,37	73,87	76,26
26	Sulawesi Tengah	77,53	77,78	78,66	79,93	79,14
27	Sulawesi Selatan	70,70	73,23	73,14	74,30	80,14
28	Sulawesi Tenggara	72,82	74,97	76,88	78,41	78,59
29	Gorontalo	75,31	77,32	79,79	79,52	76,26
30	Sulawesi Barat	73,60	75,72	76,77	78,05	75,70
31	Maluku	75,98	78,23	77,69	78,75	83,75
32	Maluku Utara	74,71	77,45	78,84	80,36	83,75
33	Papua Barat	78,65	81,80	84,22	83,31	81,62
34	Papua	79,75	80,23	81,46	81,31	81,81
	Indonesia	70,27	71,45	72,42	72,54	72,70

Sumber data : Badan pusat statistik

Tabel di atas menunjukkan wilayah Timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi, memiliki kondisi lingkungan yang lebih baik dibandingkan wilayah barat seperti Jawa dan Sumatera. Sejak tahun 2020, wilayah timur mencatat iklh yang tinggi. Sebaliknya, wilayah barat terutama di kota besar seperti DKI Jakarta, mengalami masalah kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan padatnya aktivitas ekonomi. Rendahnya IKLH di Barat berhubungan dengan pembangunan yang intens, konversi lahan dan populasi industri dan transportasi.

Menurut Rosana pada penelitiannya yaitu Semakin tinggi nilai PDRB sektor pertanian, maka kualitas lingkungan hidup (yang diukur melalui IKLH) juga cenderung meningkat.⁸ Provinsi yang mengalami penurunan IKLH secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 meskipun

⁸ Rosana, Alan. "Pengaruh Pembangunan Sektoral terhadap Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengaruhnya terhadap Kesehatan Penduduk di Indonesia Tahun 2013–2022." Skripsi, Universitas Siliwangi, 2024.

PDRB pertaniannya meningkat adalah Lampung. Sementara itu, provinsi yang mengalami penurunan IKLH dari tahun 2021 hingga 2024 adalah Banten dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi seperti Aceh dan Sumatera Barat mengalami penurunan IKLH pada tahun 2021 dan 2024, sedangkan Jambi dan Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2023. Adapun Papua dan Papua Barat mengalami penurunan IKLH hanya pada tahun-tahun tertentu, yaitu 2023 dan 2024.

IKLH mencerminkan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, termasuk sektor kehutanan yang memberi kontribusi fiskal melalui DBH SDA Kehutanan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-SDA Kehutanan) merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan.⁹ Efektivitas pemanfaatan DBH-SDA Kehutanan dalam mendukung pembangunan pertanian masih menjadi perdebatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa alokasi dana tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dan tidak diarahkan secara optimal untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan efek pengganda ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana DBH-SDA Kehutanan dapat mendorong peningkatan PDRB sektor pertanian secara signifikan,

⁹ Irwan Suharmi, "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Selatan," *Jurnal Ekonomi*, 2021, 15.

terutama di daerah-daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya kehutanan.¹⁰

DBH SDA kehutanan berdampak pada PDRB sektor pertanian melalui dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk pembangunan dan pengelolaan hutan. Ini meningkatkan PDRB sektor pertanian dengan memperbaiki lingkungan, membangun fasilitas, dan memperkuat ekonomi pedesaan. Meskipun pengaruhnya tidak langsung, dampak DBH SDA kehutanan sangat penting dalam pembiayaan pembangunan, rehabilitasi lingkungan, dan infrastruktur pertanian. Dengan mendukung pembangunan infrastruktur, konservasi lingkungan, dan ekonomi lokal, DBH SDA kehutanan membangun fondasi untuk pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan¹¹

Tabel I. 3 Data DBH Sumber Daya Alam Kehutanan se-Provinsi di Indonesia (Miliar Rupiah)

No	Provinsi	DBH – SDA KEHUTANAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	0,37	1,66	0,79	1,16	0,92
2	Sumatera Utara	15,36	27,67	25,12	16,94	11,11
3	Sumatera Barat	4,84	13,50	5,96	8,79	11,64
4	Riau	110,69	280,28	213,43	202,00	203,33
5	Jambi	23,80	82,86	55,68	47,83	13,10
6	Sumatera Selatan	34,83	119,28	94,20	68,32	89,10
7	Bengkulu	0,60	0,85	0,62	0,99	0,94
8	Lampung	1,73	8,84	4,18	9,03	6,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,20	0,52	0,27	0,12	0,08
10	Kepulauan Riau	0,85	1,05	0,70	0,43	0,75
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	4,16	10,25	8,62	7,27	6,08

¹⁰ Irwan Suharmi, Hlm.,17

¹¹ Aln Pujo Priambodol and Nur Wahyu Hidayat, “Pengaruh PAD, DAU, DBH, Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Dan Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 8, No. 1 (2024): 1–14.

13	Jawa Tengah	17,67	47,74	39,22	30,23	33,08
14	DI Yogyakarta	0,88	0,53	0,34	0,44	0,35
15	Jawa Timur	18,11	46,15	38,48	34,42	33,70
16	Banten	0,83	2,99	1,70	2,08	0,26
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1,60	2,53	1,14	2,14	3,15
19	Nusa Tenggara Timur	0,08	0,23	0,02	0,03	0,01
20	Kalimantan Barat	18,82	40,96	20,34	34,71	24,40
21	Kalimantan Tengah	122,60	281,17	157,27	169,68	273,27
22	Kalimantan Selatan	27,97	8,84	3,66	11,68	10,63
23	Kalimantan Timur	114,74	248,99	146,18	167,57	214,06
24	Kalimantan Utara	11,60	118,83	62,26	55,69	73,60
25	Sulawesi Utara	0,16	0,54	0,06	0,53	
26	Sulawesi Tengah	3,59	6,94	4,25	4,89	6,64
27	Sulawesi Selatan	0,86	2,18	2,40	13,11	1,34
28	Sulawesi Tenggara	1,14	4,39	1,88	5,19	5,30
29	Gorontalo	0,78	2,47	0,65	2,88	0,26
30	Sulawesi Barat	0,23	0,81	0,09	0,50	0,58
31	Maluku	25,27	39,33	17,44	21,50	39,41
32	Maluku Utara	10,34	25,87	6,75	9,64	19,45
33	Papua Barat	91,28	157,26	78,19	90,85	85,56
34	Papua	35,93	13,37	60,73	23,83	13,66

Sumber data : Portal Data SIKD

Data menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sumber Daya Alam Kehutanan di Indonesia tidak merata antar provinsi. Provinsi dengan hutan besar seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua Barat mendapatkan sebagian besar dana, masing-masing menerima ratusan miliar rupiah setiap tahun. Di sisi lain, provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur hampir tidak menerima DBH kehutanan karena kurangnya hutan. Beberapa provinsi di Jawa juga hanya mendapatkan alokasi kecil karena urbanisasi dan perubahan lahan.

Distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan di Indonesia berbeda antar provinsi, tergantung pada potensi sumber daya alam masing-masing. Provinsi dengan hutan luas, seperti Kalimantan

Tengah dan Papua Barat, menerima DBH besar, sementara provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali nyaris tidak mendapatkan DBH karena keterbatasan hutan. Di Jawa, meski ada hutan, alokasi DBH kecil karena urbanisasi dan peruntukan lahan. Pembagian DBH ini menyebabkan tidak merataan fiskal antar daerah dan menghambat pemerataan pembangunan.

Penelitian bagas, menunjukkan DBH SDA memiliki dampak signifikan terhadap pdrb, DBH SDA kehutanan meningkat maka PDRB juga meningkat.¹² Data menunjukkan DBH SDA Kehutanan menurun dan pdrb sektor pertanian meningkat terjadi pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan DBH SDA Kehutanan dari tahun 2020 sampai 2024, tapi sektor pertaniannya tetap tumbuh. DI Yogyakarta dan Papua juga turun DBH SDA Kehutanan dari 2021 sampai 2024, meskipun PDRB pertanian mereka terus naik. Provinsi Aceh, Jambi, Lampung, Banten, dan Gorontalo mengalami penurunan DBH SDA Kehutanan dari 2022 sampai 2024, tapi pertanian mereka tetap berkembang. Jawa Barat turun DBH SDA Kehutanan pada 2023 dan 2024, tapi sektor pertaniannya masih bertambah. Sulawesi Selatan hanya turun DBH dengan cukup besar pada 2024, walau PDRB pertaniannya tetap naik.

Secara keseluruhan, ada sekitar 100 juta orang yang bergantung pada hasil hutan dalam mensuplai kebutuhan pokok yang diperlukan untuk hidup, baik dalam bentuk barang dan jasa atau penghasilan. Paling tidak

¹² Bagas Prakoso, "Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH), Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Produk Domestik Regiaomal Bruto Di Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

sepertiga dari penduduk perdesaan bergantung pada ketersediaan bahan kayu bakar, tanaman obat, makanan, dan pupuk organik dari sampah hutan, dan sekaligus sebagai sumber penghasilan.¹³ Pembangunan kehutanan sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersediaan jalan hak pengusahaan hutan (HPH) bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.¹⁴

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan sektor pertanian adalah kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM mencerminkan meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara produktif, termasuk dalam sektor pertanian. Petani yang memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan cenderung lebih adaptif terhadap teknologi, mampu mengelola resiko usaha tani, serta memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan pasar.¹⁵ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

¹³ Vitalaya, "Pemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan" *Makalah pada acara Sarasehan dan Kongres LEI Menuju CBO : Sertifikasi Di Simpang Jalan: Politik Perdagangan, Kelestarian dan Pemberantasan Kemiskinan*, Jakarta, 2020.

¹⁴ Nur Arifatul Ulya, Syafrul Yunardy, "Analisis Peranan Sektor Kehutanan Dalam Perekonomian Indonesia: Sebuah Pendekatan Model Input-Output" *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 2021

¹⁵ Muhammad Garibaldi, "Analisis Hubungan IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 2*, No. 2 (2019): 12.

menggambarkan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat. Dalam sektor pertanian, IPM yang rendah sering kali berbanding lurus dengan rendahnya adopsi teknologi, kurangnya inovasi, dan rendahnya produktivitas.¹⁶

IPM yang tinggi menunjukkan adanya SDM berkualitas, penting untuk efisiensi sektor pertanian. IPM mempengaruhi PDRB pertanian dengan meningkatkan kualitas manusia yang terlibat dalam kegiatan pertanian. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya meningkatkan hasil pertanian dan PDRB. Terdapat hubungan positif antara IPM dan PDRB, di mana kualitas sumber daya manusia berpengaruh pada produktivitas dan efisiensi. Semakin tinggi IPM, semakin besar potensi peningkatan PDRB sektor pertanian, karena kualitas manusia berdampak pada hasil dan efisiensi produksi.¹⁷

Tabel I.4 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi di Indonesia (dalam %)

No	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	71,99	72,18	72,80	73,40	74,04
2	Sumatera Utara	71,77	72	72,71	73,37	74,02
3	Sumatera Barat	72,38	73,65	73,26	73,75	74,49
4	Riau	72,71	72,94	73,52	74,04	74,79
5	Jambi	71,29	71,63	72,14	72,77	73,43
6	Sumatera Selatan	70,01	70,24	70,90	71,62	72,30
7	Bengkulu	71,40	71,64	72,16	72,78	73,39
8	Lampung	69,69	69,90	70,45	71,15	71,81
9	Kepulauan Bangka Belitung	71,47	71,69	72,24	72,85	73,33

¹⁶ Muhammad Garibaldi, Hlm.,24

¹⁷ Indah Diana Parkah, Syamsul Huda, and Putra Perdana, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia(IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 25, No. 1 (2025): 115–21.

10	Kepulauan Riau	75,59	75,79	76,46	77,11	77,97
11	DKI Jakarta	80,77	81,11	81,65	82,46	83,08
12	Jawa Barat	72,09	72,45	73,12	73,74	74,43
13	Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	73,88
14	DI Yogyakarta	79,97	80,22	80,64	81,07	81,55
15	Jawa Timur	71,71	72,14	72,75	73,38	74,09
16	Banten	72,45	72,72	73,32	73,87	74,48
17	Bali	75,50	75,69	76,44	77,10	77,76
18	Nusa Tenggara Barat	68,25	68,65	69,46	70,20	70,93
19	Nusa Tenggara Timur	65,19	65,28	65,9	66,68	67,39
20	Kalimantan Barat	67,66	67,90	68,63	69,41	70,13
21	Kalimantan Tengah	71,05	71,25	71,63	72,20	72,73
22	Kalimantan Selatan	70,91	71,28	71,84	72,50	73,03
23	Kalimantan Timur	76,24	76,88	77,44	78,20	78,83
24	Kalimantan Utara	70,63	71,19	71,83	72,49	73,02
25	Sulawesi Utara	72,93	73,30	73,81	74,36	75,03
26	Sulawesi Tengah	69,55	69,79	70,28	70,95	71,56
27	Sulawesi Selatan	71,93	72,24	72,82	73,46	74,05
28	Sulawesi Tenggara	71,45	71,66	72,23	72,79	73,48
29	Gorontalo	68,68	69	69,81	70,45	71,23
30	Sulawesi Barat	66,11	66,36	66,92	67,55	68,20
31	Maluku	69,49	69,71	70,22	70,94	71,57
32	Maluku Utara	68,49	68,76	69,47	70,21	71,03
33	Papua Barat	65,09	65,26	65,89	66,66	67,02
34	Papua	60,44	60,62	61,39	62,25	73
	Indonesia	71,94	72,29	72,91	73,55	74,20

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menunjukkan dari tahun 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami pertumbuhan, menunjukkan kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, perbedaan antarwilayah masih jelas. Wilayah seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur memiliki IPM tinggi karena infrastruktur yang baik. Sementara itu, daerah seperti Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat masih tertinggal karena akses yang terbatas dan kondisi geografis yang buruk. Ini menunjukkan

pembangunan manusia belum merata, masih terfokus pada kawasan barat dan perkotaan.

Penelitian Diana, menunjukkan Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian maka Semakin tinggi nilai IPM suatu maka PDRB sektor pertanian cenderung meningkat secara signifikan.¹⁸ Di Sumatera Barat, PDRB sektor pertanian terus naik dari tahun 2020 sampai 2024, tapi IPM malah turun pada tahun 2022. Hal yang sama terjadi di Nusa Tenggara Timur, dimana sektor pertanian tumbuh, tapi IPM turun pada tahun 2021. Papua Barat juga menunjukkan kenaikan PDRB pertanian, tapi IPM menurun pada tahun 2024. Sedangkan di Papua, meskipun sektor pertanian berkembang, IPM tidak selalu naik karena sempat turun pada tahun 2021.

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Quarthano Reavindo Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel luas lahan sawah dan tenaga kerja pertanian terhadap PDRB sektor pertanian sebesar 67,1 % sedangkan sisanya sebesar 32,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Luas lahan sawah dan tenaga kerja pertanian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian tetapi secara partial hanya luas lahan sawah yang berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Langkat.¹⁹ Selanjutnya pada penelitian Diana Indah, Parkah dan Syamsul Huda, Putra

¹⁸ Diana Indah Parkah, dkk, Hlm., 115

¹⁹ Quarthano Reavindo, "Pengaruh Luas Lahan Sawah Dan Tenaga Kerja Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten Langkat," *Jurnal Ekonomi* 1, No. 11 (2020).

Perdana, menunjukkan bahwa secara simultan variabel IPM, tenaga kerja sektor pertanian, luas panen padi berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian. Sedangkan secara parsial variabel luas panen padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2022.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-SDA Kehutanan), Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) sektor pertanian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul **“Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-SDA Kehutanan) Dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Terhadap PDRB Sektor Pertanian Di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu,

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pertanian meningkat akan tetapi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan terjadi pada 2021-2024 di beberapa provinsi di Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pertanian meningkat akan tetapi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-

²⁰ Diana Indah Parkah, Syamsul Huda, Putra Perdana, Hlm., 115-121

SDA Kehutanan) mengalami penurunan terjadi pada 2021-2024 di beberapa provinsi di Indonesia.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pertanian meningkat akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan terjadi pada 2021-2024 di beberapa provinsi di Indonesia.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pertanian mengalami penurunan terjadi di provinsi Papua pada tahun 2023-2024, kontribusi sektor pertanian terendah terjadi di provinsi DKI Jakarta serta daerah kepulauan.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini agar hasil penelitian tidak keluar dari pokok bahasan. Penelitian ini akan menitikberatkan pada koefisien regresi. Koefisien regresi yang dihasilkan dari model akan dijadikan dasar untuk melihat dan menjelaskan tingkat pengaruh masing-masing variabel.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan bagian yang menjelaskan variabel yang sudah dipilih oleh peneliti agar dapat diukur. Sesuai dengan penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

Tabel I.5 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian (Y)	Nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi pertanian di suatu wilayah. ²¹	1. Luas Lahan Pertanian 2. Produksi 3. Neraca Perdagangan. ²²	Rasio
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (X1)	Indeks komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan tutupan lahan, kualitas udara dan air. ²³	1. Indeks Kualitas Udara 2. Indeks Kualitas Air 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan. ²⁴	Rasio
3	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan (X2)	Pendapatan transfer pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan pemanfaatan sumber daya hutan. ²⁵	1. Iuaran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) 2. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3. Dana Reboisasi. ²⁶	Rasio
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3)	Indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. ²⁷	1. Harapan Hidup 2. Rata-rata lama sekolah 3. Pengeluaran Perkapita. ²⁸	Rasio

²¹ Badan Pusat Statistik, “*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*”, 2023

²² Badan Pusat Statistik

²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia*”, 2023

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

²⁵ Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, “*Laporan Dana Transfer Daerah*”, 2023

²⁶ Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

²⁷ Badan Pusat Statistik, “*Indeks Pembangunan Manusia*”, 2023

²⁸ Badan Pusat Statistik

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025?
2. Apakah ada pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025?
3. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025?
4. Apakah ada pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2025.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan, wawasan keilmuan, kemampuan berfikir dan berguna untuk syarat menyelesaikan studi di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti untuk lebih mendalami materi terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-SDA Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB sektor pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian

a. Pengertian Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian

Menurut Sukirno, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah atau provinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai tambah produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara. Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).²⁹

Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah dari semua kegiatan

²⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah salah satunya yaitu sektor pertanian.³⁰

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi termasuk sektor yang berpotensi dalam memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam tingkat nasional maupun tingkat regional. Pertanian dapat diartikan sebagai bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat dibidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya.

Sektor pertanian adalah salah satu komponen kunci dalam struktur PDRB, khususnya diwilayah yang memiliki ekonomi berbasis pertanian. Meliputi sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, kebun, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sumbangan sektor pertanian kepada PDRB mencerminkan pengaruh pentingnya dalam kemajuan ekonomi daerah, penciptaan pekerjaan, dan ketahanan pangan.³¹ Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri nasional, meningkatkan

³⁰ Badan Pusat Statistik

³¹ Sukirno, Hlm., 161

ekspor dan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kesetaraan. Pertanian dapat menjadi pendorong sumber pertumbuhan perekonomian suatu wilayah daerah, sumber investasi bagi sektor swasta, dan penggerak utama industri-industri terkait pertanian.³²

PDRB sektor pertanian merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan nilai tambah dari seluruh aktivitas pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan di suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini menunjukkan kontribusi bersih sektor pertanian terhadap perekonomian daerah dan berguna untuk menilai perkembangan, potensi, serta arah kebijakan pembangunan ekonomi wilayah.³³

PDRB sektor pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dapat memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.³⁴ Adapun indikator- indikator pertanian yaitu antara lain:³⁵

- 1) Luas Lahan Pertanian, total luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk lahan sawah, ladang, kebun, dan

³² ³² Sukirno, Hlm., 165

³³ Ida Bagus Made Agung and Mutiara Kartika Dewi, *Ekonomi Pembangunan Pertanian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

³⁴ Arsyad, *Ekonomi Pembangunan (Edisikelima)* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2016).

³⁵ Badan Pusat Statistik, *Indikator Pertanian 2023*, vol 34, 2024

padang rumput, Dibedakan menjadi: lahan baku sawah, lahan non-sawah, dan lahan pertanian permanen.

- 2) Produksi Pertanian
 - a) Tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dan lain-lain)
 - b) Hortikultura (sayur, buah-buahan, tanaman obat)
 - c) Perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain)
 - d) Peternakan (sapi, ayam, kambing)
 - e) Perikanan (tangkap dan budidaya)
- 3) Produktivitas, hasil produksi per satuan luas (misalnya ton/ha) dan Indikator efisiensi usaha tani.
- 4) Nilai Tukar Petani (NTP), perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dan NTP mencerminkan daya beli petani dan menjadi indikator kesejahteraan.
- 5) Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Menggambarkan peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah.
- 6) Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, Jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian, termasuk petani, buruh tani, nelayan, dan peternak.
- 7) Investasi di Sektor Pertanian, Nilai investasi domestik dan asing yang masuk ke sektor pertanian, baik dari pemerintah maupun swasta.

- 8) Konsumsi Pangan, Tingkat konsumsi komoditas pangan per kapita per tahun.
- 9) Kredit Pertanian, besarnya kredit dari perbankan dan lembaga keuangan lain yang dialokasikan untuk sektor pertanian.
- 10) Ekspor dan Impor Produk Pertanian, Indikator daya saing dan ketahanan pangan nasional.

Indikator pertanian merupakan indikator pengukur perkembangan di sektor pertanian yang berasal dari data statistik pertanian yang disajikan secara sederhana agar mudah dipahami. Untuk penyusunan Indikator pertanian digunakan beberapa macam sumber data dan metode penghitungan angka indeks, distribusi persentase, maupun indikator lain yang mempermudah konsumen data memahami perkembangan di sektor pertanian sehingga memperoleh data PDRB sektor pertanian setiap tahunnya.³⁶

b. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian

1) Teori *Environment Kuznet Curve*

Environment Kuznet Curve adalah sebuah gagasan yang menyatakan adanya hubungan berbentuk "U terbalik" antara pendapatan per kapita dan kerusakan lingkungan. Di fase awal proses industrialisasi, kerusakan lingkungan

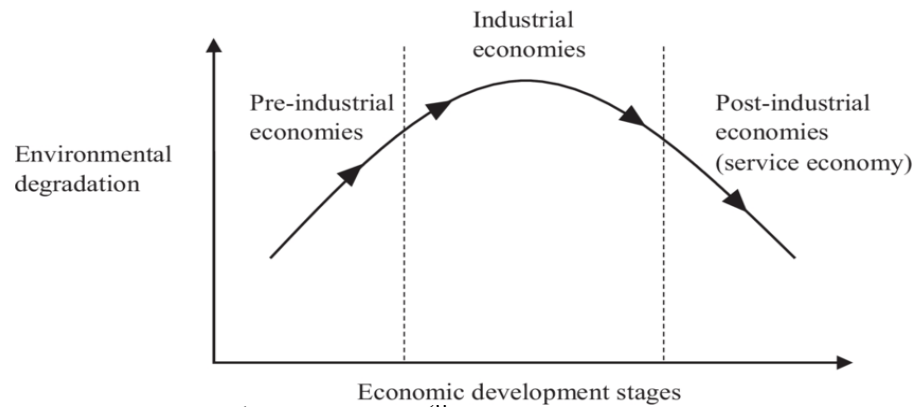
³⁶ Badan Pusat Statistik, Indikator Pertanian 2023, vol 34, 2024

cenderung meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencapai suatu titik tertentu (titik belok), kenaikan pendapatan per kapita justru disertai dengan penurunan kerusakan lingkungan.³⁷ Menurut Panayotou menggambarkan kaitan antara pembangunan ekonomi dengan degradasi yang dibagi atas tiga tahap. Pada tahap pertama yaitu *pre-industrial economies*, dimana pembangunan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan kerusakan lingkungan, tahap kedua dikenal sebagai *industrial economics*, adanya peningkatan sumberdaya alam serta adanya investasi asing yang mendorong terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri, tahap ketiga *post-industrial economics (service economy)* yaitu pergerakan dari sektor industri ke sektor jasa. Pergerakan ini akan diikuti oleh penurunan populasi yang sejalan dengan peningkatan pendapatan. Sehingga terjadi kemampuan masyarakat untuk membayar kerugian lingkungan.³⁸

³⁷ Eka Intan Kumala Putri and Nuva Maresfin, *Ekonomi Lingkungan: Tinjauan Teoritis Dan Kajian Praktis* (Bogor: IPB Press, 2022).

³⁸ Panayotou, “*Demystifying the Environmental Kuznets Curve: Turning a Black Box into a Policy Tool*”. In: *The Environmental Kuznets Curve: A Primer*. World Bank. 2017

Gambar II. 1 *Environmental Kuznet Curve*



Sumber Panayotou³⁹

Tahapan pembangunan ekonomi melalui transisi dari pertanian ke industri, kemudian pasca industri dengan perekonomian berbasis jasa. Pada tingkat pendapatan yang rendah, suatu negara akan beralih dari pertanian ke industri dan intensitas kerusakan lingkungan naik seiring dengan produksi dan konsumsi masal. Masyarakat berpendapatan rendah lebih tertarik pada pekerjaan dan pendapatan dibandingkan dengan udara dan air bersih, sedangkan dalam tingkat pendapatan yang tinggi, kemajuan pembangunan ekonomi didominasi perekonomian pasca industri atau perekonomian jasa, pada tahap ini kesadaran lingkungan naik, pengeluaran untuk lingkungan lebih tinggi, efisiensi teknologi dan kenaikan barang atau jasa ramah lingkungan. Pergerakan

³⁹ Panayotou, Hlm., 54

kurva yang mulai seimbang membawa sektor industri menjadi lebih bersih, orang menghargai lingkungan lebih tinggi.⁴⁰

2) Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menyoroti pentingnya investasi dalam mendorong kemajuan dalam jangka panjang. Penanaman modal dalam bentuk fisik dan sumber daya manusia dipandang sebagai faktor utama untuk meningkatkan kinerja serta pertumbuhan ekonomi, melalui aturan pemerintah yang memfasilitasi perbaikan fasilitas, dorongan untuk penelitian dan pengembangan teknologi, serta penanaman modal dalam pendidikan dan pelatihan karyawan, ekonomi diharapkan bisa mencapai pertumbuhan yang lebih pesat dalam waktu yang lebih lama. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menekankan bahwa investasi dalam modal fisik dan sumber daya manusia adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang berkontribusi pada peningkatan PDRB sektor pertanian.⁴¹

⁴⁰ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Harlow: Pearson Education, 2020), 531–533.

⁴¹ Ardiyanto Maksimilianus Gai and dkk, *Ekonomi Pembangunan, Teori Dan Praktik Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global* (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).

**c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian
Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pembangunan ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa dan salah satu bidang yang menjadi perhatian serius dan strategi disebabkan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah suatu negara pun dapat dilihat pada ketercapaian penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.⁴² Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto.⁴³

Para ahli ekonomi maupun ahli fiqih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan

⁴² Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). *Economic Development* (12th ed), (2015)

⁴³ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*, (2023).

ekonomi melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.⁴⁴

Dalam ekonomi Islam, distribusi mengacu pada kendali atas siapa yang memiliki sumber daya produksi dan kekayaan. Islam menetapkan prinsip dan unsur kepemilikan pribadi dan publik. Adapun konsep distribusi dalam Islam dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman:

وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَىٰ أَهْلِ مِّن رَّسُولِهِ ۖ عَلَى اللَّهِ آفَاءٌ مَّا
 بَيْنَ ۙ دُولَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ ۙ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى
 عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ أَتَكُمْ وَمَا ۙ مِنْكُمْ ۙ الْأَغْنِيَاءِ
 زَالِعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ۙ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا ۙ

Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah pedoman tata kelola keuangan publik agar otoritas negara menyalurkan sumber daya kepada masyarakat luas, bukan elite kaya.⁴⁵ Sementara Tafsir al-Qurthubi menekankan bahwa ayat ini

⁴⁴ Nurul Huda and Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

⁴⁵ Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAzīm*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah).

menjadi dasar kebijakan fiskal yang berorientasi keadilan sosial.⁴⁶ Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini sejalan dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, sehingga PDRB tidak hanya menjadi angka agregat pertumbuhan, tetapi mencerminkan kemaslahatan sosial melalui distribusi pendapatan yang lebih merata.

Pertumbuhan ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto, untuk wilayah lebih kecil atau lingkup daerah (regional) berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama di bagian sektor pertanian.⁴⁷

Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Kegiatan pertanian memanfaatkan tanah yang sumber di dataran rendah.

⁴⁶ Abū ‘Abdillāh al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 18 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

⁴⁷ Nurul Huda, hlm 154

Dalam Q.S. Al-An‘am : 141, menjelaskan tentang sumber daya alam sebagaimana firmanNya :⁴⁸

وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ
 مُتَشَابِهٍ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلُهُ مُخْتَلَفًا وَالزَّرْعَ
 تُسْرِفُوا وَلَا حَاصِدِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَأَتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلِّهَا
 الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ajaran Islam dalam bercocok tanam dijelaskan juga bahwa Agama Islam rupanya mengajarkan untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan lahan supaya produktif dengan cara ditanami. Dalam Q.S An-Nahl ayat 10 itu sendiri diingatkan tentang kekayaan flora dan fauna firman-Nya :⁴⁹

شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِّنْهُ لَكُمْ ط مَاءٌ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلِ الَّذِي هُوَ
 تُسِيمُونَ فِيهِ

Artinya:

Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya

⁴⁸ Dapertemen Agama RI, Hlm., 146

⁴⁹ Dapertemen Agama RI, Hlm., 268

(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

Tafsirnya menjelaskan bahwa, Dia-lah (Allah) yang menumbuh kembangkan, memberi tinggikan berbagai pepohonan dan tanaman yang tumbuh dengan merebat seperti pepohonan semangka, labu, mentimun, dan lain-lainnya. Maupun tanaman-tanaman yang meninggi dan membesar seperti pohon kurma, pohon kelapa, pohon jati, dan lain lainnya.⁵⁰

d. Metode Perhitungan PDRB

PDRB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

1) Metode Produksi

Metode ini menghitung PDRB berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input yang digunakan dalam proses produksi. Rumus umum untuk menghitung PDRB dengan metode produksi adalah:⁵¹

$$\text{PDRB} = \text{sum (Nilai Tambah Sektor Ekonomi)}$$

Dimana nilai tambah sektor ekonomi dihitung sebagai:

$$\text{Nilai Tambah} = \text{Nilai Output} - \text{Nilai Input}$$

2) Metode Pengeluaran

⁵⁰ Muhammad Min Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks Tersejema dan Tafsir* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

⁵¹ Zakaria and dkk, *PENGANTAR EKONOMI (Mikro Dan Makro)* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022).

Metode pengeluaran menghitung PDRB berdasarkan total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu daerah. Pendekatan ini mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Rumus umum untuk menghitung PDRB dengan metode pengeluaran adalah:⁵²

$$\text{PDRB} = C + I + G + (X - M) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana:

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

3) Metode Pendapatan

Metode pendapatan menghitung PDRB berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu daerah, termasuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Rumus umum untuk menghitung PDRB dengan metode pendapatan adalah:⁵³

$$\text{PDRB} = W + R + i + P \dots \dots \dots (2.2)$$

⁵² Zakaria, S.Pd., M.Si, dkk, 203

⁵³ Zakaria, S.Pd., M.Si, dkk, 207

Dimana:

W = Upah (gaji dan upah pekerja)

R = Sewa (pendapatan dari tanah)

i = Bunga (pendapatan dari modal)

P = Keuntungan (pendapatan dari usaha)

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

a. Pengertian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan suatu indeks yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara nasional, IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di seluruh provinsi di Indonesia.⁵⁴ Menurut Bungin, Burhan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah suatu ukuran kuantitatif untuk menilai kondisi lingkungan berdasarkan indikator-indikator tertentu yang telah di standarisasi.⁵⁵

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu tolok ukur kualitas lingkungan adalah IKLH, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan hasil penggabungan atau komposit dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas

⁵⁴ Aulia Wafa, "Analisis Determinan Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Economics, Finance, and Business Review* Vol. 1, No (2024): 1–11.

⁵⁵ Bungin and B., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, 2015).

Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).⁵⁶

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup.⁵⁷

IKLH merupakan perpaduan konsep antara *Environmental Quality Index* (EQI) dan *Environmental Performance Index* (EPI).⁵⁸ Indikator yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Predikat IKLH untuk setiap provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Sangat Baik, $IKLH > 80$
- 2) Baik, $70 < IKLH \leq 80$
- 3) Cukup Baik, $< 60 IKLH \leq 70$
- 4) Kurang Baik, $50 < IKLH \leq 60$
- 5) Sangat Kurang Baik, $40 < IKLH \leq 50$ ⁵⁹

⁵⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional*. Jakarta: KLHK, (2022).

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1)

⁵⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023).

⁵⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023).

Adapun Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari:⁶⁰

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan IKA menggunakan metode pencemaran dengan konsep bahwa semakin tingginya pencemaran maka semakin buruk kualitas air yang dimiliki. Metode ini digunakan untuk melihat status mutu air yang dipantau terhadap baku mutu air dengan satu seri data sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya. Predikat IKA setiap provinsi sebagai berikut :

- a) Sangat Baik, $IKA > 70$
- b) Baik, $60 < IKA \leq 70$
- c) Cukup Baik, $50 < IKA \leq 60$
- d) Kurang Baik, $40 < IKA \leq 50$
- e) Sangat Kurang baik, 30

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU nasional dihitung melalui pengukuran kualitas ambien di kota/kabupaten yang dilakukan pada 4 lokasi meliputi wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran dengan menggunakan metode manual *passive sampler*. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi standar

⁶⁰ BPS, *Statistik Lingkungan Hidup*, vol 43, 2024

European Union Directives dimana indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian, dan tahunan. Predikat nilai IKU setiap provinsi sebagai :

- a) Sangat Baik, $IKU > 91$
 - b) Baik, $81 < IKU \leq 91$
 - c) Cukup Baik, $71 < IKU \leq 81$
 - d) Kurang Baik, $61 < IKU \leq 71$
 - e) Sangat Kurang baik, $51 < IKU \leq 61$
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas lahan dan wilayah administratif. Berdasarkan UU No.41 tahun 1999 setiap provinsi harus memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Predikat nilai IKTL sebagai berikut :

- a) Sangat Baik, $IKTL > 80$
- b) Baik, $70 < IKTL \leq 80$
- c) Cukup Baik, $60 < IKTL \leq 70$
- d) Kurang Baik, $50 < IKTL \leq 60$
- e) Sangat Kurang baik, $40 < IKTL \leq 50$
- f) Waspada, $IKTL \leq 40$.

Tabel II.1 Indikator dan Parameter IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air	Total <i>Suspended Solids</i> (TSS)	30%
		<i>Dissolved Oxygen</i> (DO)	
		<i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD)	
		<i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD)	
		Total <i>Fosfat</i>	
		<i>Fecal Coliform</i>	
		Total <i>Coliform</i>	
2	Kualitas Udara	SO ₂ (Sulfur Dioksida) yang mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar dan sulfur lainnya	30%
		NO ₂ (Nitrogen Dioksida) yang mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar 30% bensin	
3	Kualitas Tutupan Lahan	Luas tutupan hutan, belukar dan belukar rawa yang berada dikawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai, lereng > 25%) Ruang terbuka hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati	40%

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disusun dengan tujuan sebagai berikut :⁶¹

- 1) Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁶¹ Akhmad Yani, Restiatun, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Determinannya: Studi Kasus di Indonesia" *Jurnal FEB UNILA*, Vol.3 No.5. 2023

- 2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Sebagai instrumen dan indikator keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

b. Teori Indeks Kualitas lingkungan Hidup

1) Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa proses pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas hidup manusia dan keberlangsungan ekosistem.⁶²

Menurut laporan Brundtland Report yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk

⁶² Addinul Yakin, *Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan: Teori Dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan* (Akademika Pressindo, 1999).

memenuhi kebutuhan mereka.⁶³ Dalam konteks ini, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjaga fungsi alam seperti kualitas udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati.⁶⁴

Konsep pembangunan berkelanjutan dikenal memiliki tiga pilar utama, yaitu:⁶⁵

- a) Pilar Ekonomi, menekankan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan keberlanjutan sistem produksi.
- b) Pilar Sosial, Berkaitan dengan keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berkeadilan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
- c) Menitikberatkan pada pelestarian sumber daya alam dan pengendalian pencemaran agar pembangunan tidak merusak daya dukung lingkungan.

⁶³ Addinul Yakin, hlm 61

⁶⁴ Addinul Yakin, hlm 62

⁶⁵ Addinul Yakin, hlm 88

Dalam praktiknya, pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah harus dievaluasi melalui indikator yang objektif. Salah satu alat ukur yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH mencerminkan sejauh mana kualitas lingkungan, khususnya dari aspek udara, air, dan tutupan lahan, mampu mendukung kehidupan yang sehat dan pembangunan jangka panjang.⁶⁶

2) Teori Model kesejahteraan

Model Kesejahteraan merupakan pendekatan yang melihat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Dalam model ini, kesejahteraan diartikan sebagai kondisi hidup yang layak dan seimbang, yang mencakup akses terhadap kebutuhan dasar, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang sehat.⁶⁷

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Islam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan berdasarkan berbagai indikator, seperti kualitas udara, air, dan

⁶⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023).

⁶⁷ Jackson and T, *Kemakmuran Tanpa Pertumbuhan: Fondasi Bagi Ekonomi Masa Depan (Edisi Kedua)*, 2017.

tanah.⁶⁸ Dalam perspektif Islam, IKLH tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial. Islam mengajarkan bahwa lingkungan hidup adalah amanah (trust) dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam Al-Qur'an (Al-A'raf: 56), Allah berfirman:⁶⁹

وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ لِصَلْحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا
الْمُحْسِنِينَ مِّن قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ

Artinya :

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini merupakan peringatan kepada manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi baik kerusakan lingkungan, sosial, moral, maupun spiritual setelah Allah menjadikannya baik dan seimbang. Larangan ini mencakup segala bentuk tindakan yang merusak keteraturan alam dan tatanan kehidupan, seperti eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, pencemaran, ketidakadilan sosial, dan penyimpangan akhlak.⁷⁰ Manusia sebagai khalifah (wakil) di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Tindakan merusak lingkungan tidak hanya berdampak negatif bagi alam, tetapi juga bagi kehidupan

⁶⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023)

⁶⁹ Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI.

manusia itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral.⁷¹

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-SDA Kehutanan)

a. Pengertian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu:

- 1) Prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan,
- 2) Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyeteroran Penerimaan Negara Pajak

⁷¹ Dementarian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. QS. Al-A'raf(7), 2019).

(PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan.⁷²

Dana bagi hasil sumber daya alam ialah bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan tiap provinsi di Indonesia. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, perolehannya tergantung dari besar kecilnya kekayaan alam yang dikelola dalam suatu daerah. Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA ini sendiri diatur dalam PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otsus, UU No. 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

73

DBH-SDA dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu oleh asal dan oleh aktual. Prinsip oleh asal berarti bahwa daerah yang menghasilkan penerimaan negara menerima porsi (persentase) yang lebih tinggi, sementara daerah lain dalam provinsi yang sama mendapatkan porsi (persentase) yang berdasarkan pemerataan. Sebaliknya, prinsip oleh aktual menetapkan bahwa jumlah DBH yang disalurkan kepada daerah, baik yang menghasilkan maupun yang mendapatkan

⁷² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, “*Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*” 2017.

⁷³ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

alokasi pemerataan, ditentukan berdasarkan nilai realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran berjalan. Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah pada dasarnya ada lima jenis yaitu DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara, DBH Pengusahaan Panas Bumi, DBH Kehutanan dan DBH Perikanan.⁷⁴

Dana bagi hasil kehutanan pada dasarnya bersumber dari tiga jenis PNBP Kehutanan sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Provisi Sumber Daya Hutan, hasil alam hutan seperti kayu, madu, dan buah yang langsung dimanfaatkan manusia, penting untuk ekonomi dan kehidupan, dan harus dikelola secara lestari.
- 2) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, biaya yang dikenakan kepada pihak yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan, guna memastikan pemanfaatan tersebut legal, berkelanjutan, dan mendukung pengelolaan hutan.
- 3) Dana Reboisasi, dana yang dipakai untuk menanam kembali dan memelihara hutan agar tetap lestari setelah dilakukan pemanfaatan.

⁷⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

⁷⁵ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, "*Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*" 2017.

b. Teori DBH-SDA Kehutanan

1) Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah proses di mana pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dan pengeluaran publik. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁷⁶

DBH SDA juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara daerah penghasil dan daerah non-penghasil. Dengan memberikan alokasi dana yang adil, diharapkan daerah penghasil dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pengelolaan DBH SDA harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum.⁷⁷

⁷⁶ Faguet, Jean-Paul, *Decentralization and Governance*. In: The Oxford Handbook of Governance. Oxford University Press, (2016).

⁷⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Andi Offest, 2019).

2) Teori Keagenan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Teori keagenan (*agency theory*) adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (pengelola) dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, prinsipal biasanya adalah masyarakat atau pemerintah yang memiliki sumber daya, sedangkan agen adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya tersebut. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.⁷⁸ Dengan adanya DBH SDA, pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat. Masyarakat sebagai prinsipal memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Teori keagenan juga mengingatkan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait

⁷⁸ Sihombing and R, *No Title Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (Salemba Empat, 2016).

penggunaan DBH SDA, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodasi.⁷⁹

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan keputusan/kebijakan agar tepat sasaran, serta perlu dilakukan evaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu alat ukur yang digunakan adalah *Human Development Indeks* (HDI) atau IPM didapatkan dari hasil pengukuran perbandingan angka derajat kesehatan, kualitas pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat untuk semua negara seluruh dunia. Tingginya tingkat IPM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan masyarakat untuk bisa berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan produktivitas dan kreatifitas.⁸⁰

UNDP (*United Nation Development Programme*) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 1990 sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan

⁷⁹ Sofyani, H, and Anggadini S.D, *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Praktik, Dan Riset Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

⁸⁰ Darwis Harahap and dkk, "Determinants of Development Inequality between Regions in North Sumatra Province," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* Vo. 8, No. (2022): 252–53.

pembangunan manusia. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk secara fisik, mental maupun spiritual.⁸¹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia dengan basis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.⁸² Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Diklasifikasikan oleh lembaga UNDP (*united nation development programme*) IPM sebagai “suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk”. Maka dari

⁸¹ United Nations, “*Human Development Index*,” Human Development Reports (United Nations), 2024

⁸² Badan Pusat Statistik Indonesia “*Indeks Pembangunan Manusia*,” 2020

itu, yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia salah satunya adalah IPM.⁸³

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit atau gabungan dari beberapa indikator yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.⁸⁴

b. Teori Tentang Indeks Pembangunan Manusia

1) Teori Pembangunan Manusia

Amartya Sen dalam karyanya *Development as Freedom*, menganalisis tentang konsep pembangunan yang berbeda dari pandangan konvensional. Sen berargumen bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses untuk meningkatkan kebebasan manusia menuju hidup yang lebih bermakna dan sejahtera. Kebebasan manusia dipandang sebagai indikator utama pembangunan, oleh karenanya dimensi kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang

⁸³ United Nations,

⁸⁴ Badan Pusat Statistik “*Indeks Pembangunan Manusia 2023*”

berkaitan dengan indeks pembangunan manusia perlu diperhatikan.⁸⁵

Sen mengatakan kelaparan yang merupakan bentuk kemiskinan seringkali disebabkan oleh kegagalan distribusi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, berbeda dengan pandangan tradisional yang menyalahkan kekurangan bahan pangan.⁸⁶ Ketimpangan distribusi dan sumber daya akan mengakibatkan sulit mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan layanan lain sehingga kualitas hidup tidak optimal.

2) Teori *Human Capital*

Human Capital (modal manusia) adalah istilah yang sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan dan kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat mengoptimalkan produktivitas. Investasi di bidang modal manusia dianalogikan sebagai investasi konvensional dalam modal fisik. Setelah dilakukan investasi awal, aliran pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan.⁸⁷

⁸⁵ Achamd Nur Hidayat and Nofrian Bakarudin, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁸⁶ Hidayat dan Bakarudin, hlm. 118

⁸⁷ Todaro, M.P, and Smith, *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid 1)* (Jakarta: Erlangga, 2016).

Terdapat dua pendekatan dalam teori human capital, yaitu pendekatan *Nelson-Phelp* dan pendekatan Lucas. Pendekatan *Nelson-Phelp* menyimpulkan bahwa modal manusia merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan suatu negara, oleh karenanya perbedaan dalam stok modal manusia dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di berbagai negara. Hal ini didukung oleh pendekatan Lucas yang menyimpulkan bahwa angkatan kerja yang lebih terdidik akan lebih mampu berkualifikasi dalam lapangan kerja dan mampu merespon inovasi yang selanjutnya dapat meningkatkan penghasilan yang berdampak pada kesejahteraan.⁸⁸ Teori *Human Capital* menjelaskan bahwa pendidikan dapat meningkatkan penghasilan. Setiap satu tahun penambahan sekolah berarti di suatu pihak terdapat peningkatan kemampuan kerja yang berdampak pada peningkatan penghasilan seseorang.⁸⁹ Maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam peningkatan PDRB, yaitu untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta wawasan agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya

⁸⁸ Sopan Adrianto and Helena Ras Ulina Sembiring, *Memposisikan Human Capital Menuju Indonesia Tangguh Dan Tumbuh* (Elex Media Komputindo, 2022).

⁸⁹ Sopan Adrianto dan Sembiring, hlm. 54

semakin tinggi pendidikan seseorang maka hidupnya akan semakin berkualitas.

c. **Komponen IPM**

Pembangunan manusia adalah manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yang diduduki oleh paradigma pembangunan, adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan atau usia hidup panjang dan sehat dan meningkatkan pendidikan.⁹⁰ Dalam pembangunan arti penting manusia dipandang sebagai subjek pembangunan yang artinya bertujuan untuk kepentingan manusia (masyarakat) dalam melakukan pendidikan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tiga hal pokok dapat diarahkan dalam pembangunan suatu negara, yaitu meningkatkan standar hidup masyarakat, meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan meningkatkan kemampuan akses masyarakat baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupan.⁹¹

Indeks Pembangunan Manusia dalam UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu untuk mengukur kesuksesan

⁹⁰Todaro, M. P., & Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kesembilan, Jilid 1). Terjemahan: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2016

⁹¹Todaro dan Smith, hlm 156

kesejahteraan dan pembangunan suatu negara. Kesehatan diukur oleh indikator angka harapan hidup, pendidikan diukur oleh indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah dan standar hidup diukur oleh indikator daya beli. Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah menjadi kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.⁹²

Adapun klasifikasi status pembangunan manusia yaitu:

- 1) Rendah, 60
- 2) Sedang, $60 < IPM < 70$
- 3) Tinggi, $70 < IPM < 80$
- 4) Sangat Tinggi, $IPM > 80$.⁹³

Indeks pembangunan manusia memiliki beberapa komponen antara lain:⁹⁴

- 1) Angka harapan hidup (AHH), dalam waktu lahir adalah seseorang selama hidup menempuh rata-rata perkiraan banyak tahun.

⁹² Darwis Harahap dkk., "Determinants of development inequality between regions in North Sumatra Province," At-tijarah: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 8, no. 2 (2022): hlm 252-253

⁹³ Badan Pusat Statistik

⁹⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia "Indeks Pembangunan Manusia 2020."

- 2) Angka melek huruf (AMH) , persentasi penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat menulis huruf latin atau huruf lain dan membaca yang menggambarkan jumlah tahun disebut angka melek huruf.
- 3) Rata-rata lama sekolah, penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang merupakan rata-rata lama sekolah.
- 4) Disesuaikan Pengeluaran riil per kapita, UNDP mengukur standar hidup layak memakai Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS yang di sesuaikan dengan formula *Atkinson* dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita riil.

d. Metode Perhitungan IPM

IPM diubah dari rata-rata penduduk menjadi rata-rata geometrik dalam metode agregasi. Memasukkan angka harapan hidup lama sekolah dan rata-rata lama sekolah PNB menggambarkan PDB Karena lebih menggambarkan pendapatan pada suatu wilayah.⁹⁵ Indikator yang digunakan dan bisa membedakan dengan baik dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah dan PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapat masyarakat pada suatu

wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain.⁹⁶

Indikator yang penting dalam melihat sisi lain salah satu manfaat indeks pembangunan manusia. IPM adalah indikator penting dalam mengukur keberhasilan alam upaya membangun kualitas hidup manusia dan sebagian data dalam ukuran kinerja pemerintah dan salah satu alokasi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan manfaat penting indeks pembangunan manusia.⁹⁷ Pembahasan dan analisis dilakukan dengan cara mengaitkan hubungan indikator IPM yaitu harapan hidup, pendidikan, dan kehidupan layak dengan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung sebagai rata-rata dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (X1 + X2 + X3) \dots \dots \dots (2.3)$$

Keterangan :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

⁹⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2023: Metodologi dan Analisis*. Jakarta: BPS, 2023

⁹⁷ Rafidah Azmi, "Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Labuhanbatu" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

5. Hubungan Antar Variabel

Sumber daya alam sebagai modal utama dalam pembangunan, peran dan kontribusi sumber daya alam dalam perekonomian dan kehidupan manusia merupakan konsep dasar sumber daya alam sebagai modal alam (*natural capital*). Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan penopang system kehidupan (*life support system*). Dengan adanya fungsi tersebut, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.⁹⁸

a. Hubungan antara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan PDRB Sektor Pertanian.

Untuk mengetahui jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah digunakan istilah Produk Domestik Regional Bruto

⁹⁸ Simarmata, dkk, Hlm.,54

yang atau PDRB.⁹⁹ Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin tinggi pula kegiatan ekonomi daerah tersebut. Pada umumnya ketika suatu negara melakukan pertumbuhan ekonomi pasti akan diikuti oleh perusakan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Sehingga akhirnya, pertumbuhan ekonomi berdampak jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan dan menyebabkan penurunan sumber daya alam serta menyebabkan kerusakan lingkungan melalui pengaruh eksternal dari proses produksi dan konsumsi. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, penting untuk memahami interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Sektor pertanian, sebagai salah satu pilar utama perekonomian, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Penelitian yang dilakukan Muhammad Roby Setiawan dan Wiwin Priana Primandhana, menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan memiliki pengaruh positif

⁹⁹ Pratiwi and dkk, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten/ Kota Jawa Timur Tahun 2015-2019" Vol. 4, No (2021): 6.

signifikan terhadap IKLH.¹⁰⁰ Semakin tinggi nilai IKLH maka PDRB sektor pertanian juga akan meningkat.

Hubungan antara IKLH dan PDRB sektor pertanian dapat dilihat dari dua sisi. Jika PDRB sektor pertanian naik dengan praktik berkelanjutan, ini bisa berdampak positif untuk IKLH. Praktik seperti teknologi ramah lingkungan dan pertanian organik dapat meningkatkan hasil tanpa merusak lingkungan. Namun, jika pertumbuhan PDRB tidak diimbangi praktik berkelanjutan, dampak negatif bisa terjadi, seperti pencemaran tanah dan air. Jadi, penting untuk membuat kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan agar ekonomi berkembang tanpa merugikan lingkungan.¹⁰¹

b. Hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dengan PDRB Sektor Pertanian.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan PDRB sektor pertanian. Penelitian oleh Sari dan Prasetyo menemukan bahwa daerah yang menerima alokasi DBH Kehutanan yang lebih besar cenderung memiliki PDRB sektor pertanian yang lebih tinggi, terutama jika dana tersebut digunakan

¹⁰⁰ Muhammad Roby Setiawan, "Analisis Pengaruh Beberapa Sektor PDRB Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vo. 19, No (2022): 53–62.

¹⁰¹ Izzatul Ummi, "Hubungan Sektor-Sektor Pdrb Dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2012-20217" (Universitas Negeri Semarang, 2019).

untuk investasi dalam infrastruktur dan program pelestarian lingkungan.¹⁰² Sebaliknya, penelitian lain oleh Rahman dkk, menunjukkan bahwa kurangnya pengelolaan yang baik terhadap DBH Kehutanan dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian.¹⁰³

Hubungan antara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dapat dilihat dari beberapa sisi. Pengalokasian DBH Kehutanan yang efisien dapat meningkatkan investasi di sektor pertanian. Dengan anggaran yang cukup, pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur pertanian yang mendukung produktivitas. Selain itu, DBH Kehutanan dapat digunakan untuk program pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan pertanian, seperti reboisasi dan pelatihan petani. Namun, pengelolaan DBH Kehutanan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan yang merugikan sektor pertanian dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik.

¹⁰² Dina Merris Maya Sari and Yudy Prasety, "Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* Vol. 18, N (2020): 123–35.

¹⁰³ Rahman and Setiawan, "Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kehutanan Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian," *Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* Vol. 7, No (2019): 45–58.

c. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan PDRB Sektor Pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Indah Parkah dkk, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Peningkatan IPM, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, berkontribusi pada pertumbuhan PDRB sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi.¹⁰⁴

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi memiliki korelasi positif yang signifikan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Hal ini terutama tercermin melalui peningkatan produktivitas petani, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penguatan akses pasar dan teknologi. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pertanian yang berbasis pada IPM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani, sehingga mereka lebih mampu mengadopsi praktik pertanian modern yang efisien. Selain itu, pembangunan infrastruktur pedesaan yang memadai, seperti jalan dan irigasi, akan mempermudah akses petani ke pasar dan meningkatkan distribusi hasil pertanian.

¹⁰⁴ Diana Indah Parkah, Huda Syamsul, and Putra Perdana, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 25, N (2025): 115–21.

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kebijakan terpadu yang tidak hanya fokus pada peningkatan IPM, tetapi juga pada perlindungan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan IPM tidak hanya akan memberikan manfaat dalam hal kesehatan dan pendidikan, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat melalui sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Tino Handayani, Didik Susetyo dan M. Syirod Saleh (2021)	Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Selatan	Belanja modal, infrastruktur jalan panjang, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Variabel infrastruktur jalan panjang dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. ¹⁰⁵
2	Bagus Prakoso (2022)	Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh), Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil	IKLH memiliki hubungan yang negatif dengan PDRB, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

¹⁰⁵ Tino Handayani and dkk, "Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 15, N (2017): 92–100.

		Sumber Daya Alam (Dbh Sda) Terhadap PDRB Di Indonesia (Studi Kasus Pada 15 Provinsi Tahun 2011 – 2019).	berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. ¹⁰⁶
3	Heniwati Gulo (2022)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan hasil. ¹⁰⁷
4	Tara May Sabilla dan Hadi Sumarsono (2022)	Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB	Belanja pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan signifikan dan positif, sedangkan Penanaman Modal Dalam negeri memiliki hubungan tidak signifikan namun positif. ¹⁰⁸
5	Diana Indah Parkah, Syamsul Huda, Putra Perdana (2023)	Analisis Pengaruh IPM, Tenaga Kerja sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian.	IPM, Tenaga kerja dan luas panen padi berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. ¹⁰⁹
6	Dwi Fazriani Ashal (2024)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap

¹⁰⁶ Bagus Prakoso, “Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH) Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Indonesia (Studi Kasus Pada 13 Provinsi Tahun 2011-2019)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

¹⁰⁷ Heniwati Gulo, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat” (Universitas Islam Kuantan Singingi, 29-30 November 2022, 2022).

¹⁰⁸ Tara May Sabilla and Hadi Sumarsonp, “Pengaruh Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB,” *Jurnal Feb UNMUL, FORUM EKONOMI* Vol. 24, N (2022): 54–64.

¹⁰⁹ Diana Indah Parkah and dkk, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 23, No. 1 (2023).

		Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010–2022	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ¹¹⁰
7	Andre Budihardjo ¹ , Fitri Arianti, Fuad Mas'ud (2021)	Pengaruh investasi, tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia terhadap pdrb (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)	Investasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB, IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB, secara simultan investasi, tenaga kerja, dan IPM berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB. ¹¹¹

Persamaan dan Perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Persamaan dengan penelitian Tino Handayani, Didik Susetyo dan M. Syirod Saleh Sama-sama meneliti pengaruh variabel pembangunan (seperti IPM) terhadap PDRB. Sedangkan perbedaannya penelitian ini bersifat agregat di tingkat provinsi dan tidak fokus pada sektor pertanian maupun aspek lingkungan dan kehutanan seperti penelitian saya.

¹¹⁰ Dwi Fazriani Ashal, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil (DBH) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2022” (2024).

¹¹¹ Andre Budihardjo and dkk, “PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018),” *Journal of Economics* Vol. 9, No (2020): 1–9.

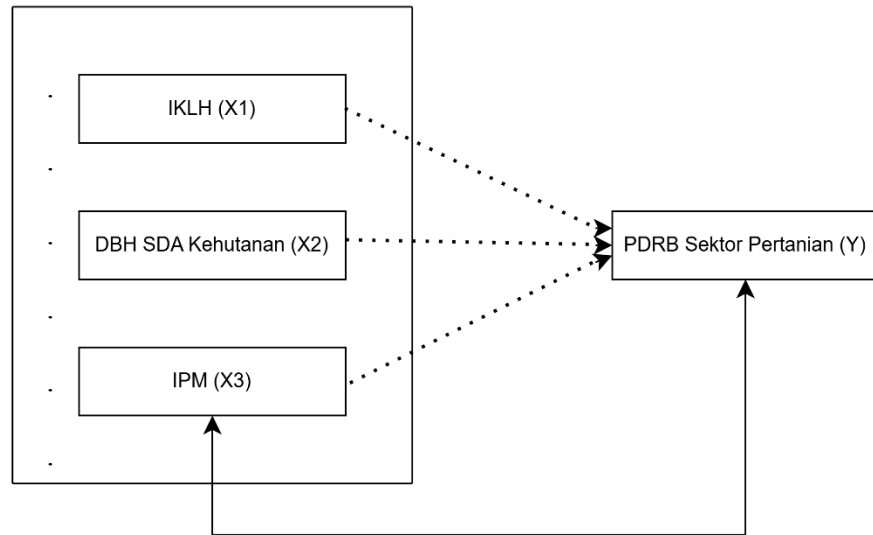
2. Persamaan dengan Bagus Prakoso Menggunakan variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Perbedaannya penelitian ini mencakup 15 provinsi secara umum tanpa menitikberatkan pada sektor pertanian atau DBH SDA kehutanan, serta tidak menggunakan IPM
3. Persamaan dengan penelitian Heniwati Gulo Sama-sama meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan DBH terhadap PDRB. Fokus pada transfer dana dari pusat ke daerah. Perbedaannya tidak mengkaji aspek lingkungan atau pembangunan desa (IPD), dan tidak menitikberatkan pada sektor pertanian seperti dalam penelitian ini.
4. Persamaan dengan penelitian Tara May Sabilla dan Hadi Sumarsono Sama-sama meneliti faktor-faktor pembangunan daerah terhadap PDRB, termasuk PAD dan IPM yang terkait erat dengan pembangunan wilayah. Perbedaannya tidak meneliti sektor pertanian dan tidak mencantumkan variabel lingkungan atau kehutanan seperti IKLH dan DBH SDA Kehutanan.
5. Persamaan dengan penelitian Diana Indah Parkah, Syamsul Huda, dan Putra Perdana memiliki fokus yang sama pada PDRB sektor pertanian, sehingga relevan secara sektoral. Perbedaannya Tidak meneliti pengaruh faktor lingkungan atau kehutanan seperti IKLH dan DBH SDA Kehutanan, serta tidak menggunakan variabel IPM.

6. Persamaan dengan penelitian Dwi Fazriani Ashal Sama-sama meneliti pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap PDRB, serta menggunakan data panel daerah. Perbedaannya tidak berfokus pada sektor pertanian dan tidak menyertakan variabel lingkungan (IKLH) maupun indeks pembangunan desa (IPD) dalam model penelitiannya.
7. Persamaan dengan penelitian Andre Budihardjo, Fitri Arianti, dan Fuad Mas'ud menggunakan variabel IPM yang secara konseptual sejalan dengan IPD, serta membahas hubungan pembangunan manusia dengan PDRB. Perbedaannya Fokus pada pertumbuhan PDRB secara umum di Provinsi Jawa Tengah dan tidak membahas sektor pertanian maupun aspek lingkungan dan kehutanan seperti penelitian ini.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar II. 2 Kerangka Pikir



... : Pengaruh Secara parsial

_____ : Pengaruh Secara Simultan

Gambar II.2 diatas menunjukkan bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1 terhadap X2, X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, dan X1, X2, X3 terhadap Y.

Menurut Muhammad Roby Setiawan, Wiwin Priana Primandhana, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Ini berarti bahwa jika Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi lebih tinggi, maka PDRB sektor pertanian juga akan semakin bertambah.¹¹²

¹¹² Roby Setiawan, "Analisis Pengaruh Beberapa Sektor PDRB Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia."

Menurut penelitian Anisah Meilynda, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian, mencatat bahwa peningkatan penerimaan DBH dapat meningkatkan investasi dan belanja di sektor pertanian, mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.¹¹³

Menurut penelitian Diana Indah Parkah, Syamsul Huda, Putra Perdana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Beberapa studi mengindikasikan bahwa peningkatan IPM, melalui faktor-faktor seperti pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi.¹¹⁴

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.¹¹⁵ Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

¹¹³ Anisah Meilynda, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap PDRB Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan” (Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi, 2024).

¹¹⁴ Indah Parkah, Syamsul, and Perdana, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian.”

¹¹⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2024).

- H1 : Terdapat Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia
- H2 : Terdapat Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian di Indonesia
- H3 : Terdapat Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia
- H4 : Terdapat Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Provinsi di Indonesia pemilihan daerah penelitian didasarkan dengan Luas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang paling banyak di Indonesia. Objek penelitian adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan pemilihan tahunnya adalah tahun 2020 hingga 2024 sebagai rentang waktu penelitian berdasarkan kesediaan data. Waktu penelitian Mei 2025 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang memandang sesuatu realitas itu dapat di klasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya adalah kausal atau bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.¹¹⁶ Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan menggunakan tiga variabel independen (bebas) yaitu Indeks

¹¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2024).

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu sekelompok individu atau objek yang dapat bersifat terbatas atau tidak terbatas dalam jumlahnya. Populasi ini terdiri dari subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan disimpulkan.¹¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang mengalami kebakaran hutan lahan terbesar selama 5 priode. Kebakaran Hutan tersebut yaitu yang di alih fungsikan menjadi lahan pertanian guna meningkatkan PDRB Sektor Pertanian. Berikut adalah tabel populasi yang mencantumkan 38 provinsi.

Tabel III. 1 Data Kebakaran Hutan Lahan (satuan hektar)

NO	Provinsi	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1,078,00	1,267,00	3,716,00	1.936,86	7,257,35
2	Sumut	3,744,00	4,078,00	7,516,00	2,113,75	7,032,27
3	Sumbar	1,573,00	2,068,00	9,832,00	4,885,13	3,052,20
4	Riau	15,442,00	8,970,00	4,915,00	7,267,03	11,027,96
5	Jambi	1,002,00	540,00	918,00	6,539,68	5,636,69
6	Sumsel	950,00	5,245,00	3,723,00	132,082,86	3,052,20
7	Bengkulu	221,00	93,00	1,620,00	75,94	355,05
8	Lampung	1,358,00	5,411,00	7,989,00	6,506,00	13,242,01
9	Kep.Bangka Belitung	576,00	385,00	328,00	4,752,98	2,915,46

¹¹⁷ Sugiyono, hlm 130.

10	Kep Riau	15,442,00	8,970,00	4,915,00	7,267,03	11,027,96
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
12	Jabar	2,344,00	1,299,00	2,005,00	11,524,80	4,548,58
13	Jateng	7,516,00	599,00	107,00	9,965,59	3,725,63
14	DI Yogyakarta	181,00	0,00	0,00	119,91	51,91
15	Jatim	19,148,00	15,458,00	2,380,00	49,498,32	20,957,17
16	Banten	2,00	0,00	0,00	1,01	362,83
17	Bali	29,00	3,00	0,00	2,011,27	316,36
18	NTB	29,157,00	101,173,00	30,567,00	66,716,43	46,189,73
19	NTT	114,719,00	137,343,00	70,637,00	102,536,89	113,089,51
20	Kalbar	7,646,00	20,590,00	21,836,00	111,848,43	24,154,63
21	Kalteng	7,681,00	3,653,00	1,554,00	165,896,44	11,459,89
22	Kalimantan Selatan	4,017,00	8,625,00	429,00	190,394,58	4,993,88
23	Kaltim	5,221,00	3,029,00	373,00	39,494,41	22,570,50
24	Kaltara	1,721,00	1,678,00	370,00	796,36	2,429,21
25	Sulut	177,00	579,00	469,00	2,531,44	651,68
26	Sulteng	2,555,00	3,133,00	3,704,00	10,844,28	4,920,70
27	Sulsel	1,902,00	916,00	997,00	6,489,26	3,522,91
28	Sultara	3,206,00	2,124,00	3,098,00	18,736,47	1,629,74
29	Gorontalo	80,00	163,00	101,00	666,33	767,03
30	Sulbar	569,00	886,00	488,00	2,132,31	994,74
31	Maluku	20,270,00	11,807,00	14,954,00	45,999,39	13,404,83
32	Maluku Utara	59,00	108,00	171,00	542,18	102,57
33	Papua Barat	5,716,00	77,00	1,738,00	259,03	198,85
34	Papua	28,277,00	15,979,00	8,336,00	604,01	544,19
35	Papua Barat Daya	-	-	-	504,24	28,42
36	Papua Selatan	-	-	-	150,813,34	27,182,19
37	Papua Tengah	-	-	-	2,593,91	104,02
38	Papua Pegunungan	-	-	-	787,11	461,56
	Indonesia	296,942,00	358,867,00	204,894,00	1,161,192,90	376,805

Sumber data : KLHK

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu objek yang menjadi representasi populasi, dan pengambilannya harus sesuai dengan

kualitas serta karakteristik populasi.¹¹⁸ Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan cara untuk menentukan sampel dengan kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹⁹ Adapun kriteria pengambilan sampel dari penelitian tersebut yaitu :

- a) Kebakaran hutan dan lahan dengan pendekatan 3 tahun terakhir dan atau luasnya diatas belasan ribu hektar.
- b) Data kebakaran hutan lahan tersedia dari tahun 2021-2024.

Adapun provinsi yang mengalami kebakaran hutan terluas dalam 5 tahun terakhir terdiri dari 12 provinsi yaitu Aceh, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Riau. Sehingga jumlah data tersebut digunakan sebanyak 48.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden atau sumber lainnya dalam suatu penelitian atau studi, dalam pilihan instrumen pengumpulan data sangat tergantung pada jenis penelitian,

¹¹⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹¹⁹ Dani Nur Saputra and dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian* (Feniks Muda Sejahtera, 2022).

tujuan penelitian, dan jenis data yang ingin dikumpulkan.¹²⁰ Berikut studi yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diambil sumber buku-buku, jurnal, *website*, dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Berikut studi yang dilakukan dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi atau penelitian dokumenter dapat mengumpulkan informasi dengan cara menggunakan catatan tertulis seperti arsip atau dokumen, surat, buku yang membahas pandangan, teori, argumen atau peraturan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.¹²¹

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan pemahaman mengenai hasil pengolahan data tersebut yang digunakan untuk menjawab masalah yang sudah ditentukan. Data panel adalah gabungan antara runtut waktu (*time series*) dan data silang (*Cross Section*). Dalam data panel nilai akan diambil dari jangka waktu tertentu, misalnya dari sebuah kumpulan data (data set) dimana

¹²⁰ Yudawisastra and dkk, *Metodologi Penelitian* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023).

¹²¹ Abigail Soesana and dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (yayasan Kita menulis, 2023).

perilaku unit *cross-sectional* (seperti individu atau perusahaan) diamati sepanjang waktu.¹²² Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan data panel yang dalam proses pengujiannya akan dibantu oleh Aplikasi Eviews 13.

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan jenis statistik yang digunakan untuk memeriksa data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa tujuan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas atau membuat generalisasi. Dalam kategori statistik deskriptif terdapat penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, serta perhitungan seperti modus, median, dan mean sebagai ukuran tendensi sentral, serta perhitungan desil, persentil, dan presentase.¹²³

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan dengan *uji Jarque-Bera* dalam aplikasi eviews, *Jarque-Bera* adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji tersebut mengukur perbedaan *Skewness* dan *Kurtosis* data. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal dan

¹²²Zulaika Matondang and Hamni Fadillah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews & SPSS* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021).

¹²³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 227.

apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.¹²⁴

3. Model Data Panel

Data panel sering disebut juga *pooled data* (*pooling time series dan cross section*) *micropanel data*, *longitudinal data*, *event history analysis* dan *chohort analysis*, Semua istilah ini memiliki arti tentang pergerakan yang terjadi seiring berjalannya waktu dari satuan *cross sectional*. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (dataset) dimana perilaku unit *cross-sectional* (misalnya individu, perusahaan, Negara) diamati sepanjang waktu. Model data panel ada 3, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *Random effect*. Namun, perlu memilih salah satu cara yang paling sesuai untuk menganalisis data berikut akan dijelaskan secara satu per satu.¹²⁵

a. *Common Effect*

Common Effect adalah metode dalam analisis data panel yang paling dasar karena menganggap bahwa semua objek yang diteliti serupa baik secara individu maupun dalam waktu, padahal sebenarnya objek-objek tersebut memiliki perbedaan.

¹²⁴ Matondang dan Nasution, hlm. 25

¹²⁵ Matondang dan Nasution, hlm. 136.

b. Fixed Effect

Istilah *fixed effect* menunjukkan walaupun intercept mungkin berbeda pada setiap individu, tetapi intercept individu tersebut tetap sama dari waktu ke waktu, sehingga model *fixed effect* juga diasumsikan bahwa koefisien slope tidak bervariasi berubah, baik untuk individu maupun waktu (konstan).

c. Random Effect

Teknik yang digunakan dalam *Random effect* adalah dengan memasukkan variabel pengganggu yang mungkin muncul dalam hubungan antara waktu dan antara individu atau tempat yang lainnya. Dalam hal ini variabel gangguan adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu, karena itu model *random effect* sering disebut juga dengan *error component model* (ECM).

4. Pemilihan Model Data Panel

Model data panel ada 3, yaitu model Common Effect Fixed Effect dan Random Effect. Namun untuk melakukan estimasi dan analisis hasil, tidak digunakan ketiga-tiganya. Harus diputuskan model mana yang menjadi model terbaik. Ada tiga cara pemilihan model yakni dengan uji chow, hausman test dan

uji Lagrange Multiplier (LM). Berikut di bawah ini merupakan penjelasannya:¹²⁶

a. Uji *Chow*

Uji *chow* atau disebut juga dengan *likelihood ratio*, uji tersebut digunakan untuk apakah model *pooled leaset square (common effect)* atau *fixed effect* model yang akan dipilih untuk penilaian data. Tes ini dapat mengidentifikasi model mana yang paling tepat, sehingga dapat dinilai dari angka *probabilitas* (Prob.) untuk *cross section* F yang ketentuannya:

a) Jika nilai Prob. > 0,05 maka model yang terpilih adalah

Common Effect.

b) Jika nilai Prob. < 0,05 maka model yang terpilih adalah

Fixed Effect.

b. Uji *Hausman*

Jika pada hasil uji *chow*, model yang terpilih adalah model *fixed effect*, maka harus dilanjutkan dengan pengujian model, pada uji hausman dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau model *random effect* adalah cara model terbaik untuk melakukan pengujian tersebut, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai *probabilitas* (Prob.) *cross section Random*, dengan ketentuan:

¹²⁶ Matondang dan Nasution. hlm. 151.

- a) Jika Prob. *Cross-Section Random* $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah model *Random Effect*.
- b) Jika Prob. *Cross-section Random* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah model *Fixed Effect*.
- c. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (Uji LM) digunakan untuk menentukan model mana yang sebaiknya dipilih untuk melakukan model *Random effect* atau *common Effect*. Keputusan yang diambil dalam uji tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai *Test Hypothesis Cross-Section* dengan *alpha*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai Prob. *Value* dari *Breuch-Pagn* $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah model *common effect*.
- b) Jika nilai Prob. *Value* dari *Breuch-Pagn* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect*.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat variabel independen yang memiliki kesamaan di antara variabel independen dalam suatu model.

Jika *Auxiliar Regression* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,80 maka tidak terjadi multikolinieritas.¹²⁷

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi memiliki tujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier atau hubungan antara kesalahan yang mengganggu di periode t dengan kesalahan yang mengganggu di periode $t-1$ (yang sebelumnya).

c) Jika $-2 < +2$ berarti tidak terdapat autokorelasi

d) Jika $-2 < +2$ berarti terdapat autokorelasi.

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan cukup ilmiah atau tidak.¹²⁸ Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu, Uji Simultan / Fisher (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Uji Parsial (Uji t)

a. Uji Parsial (Uji- t)

Jika probabilitas $> \alpha$ 5% atau t hitung $\leq t$ tabel maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Bila probabilitas $< \alpha$ 5% atau t hitung $> t$ table maka variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji Simultan (Uji-F)

¹²⁷ Matondang dan Nasution, hlm. 89.

¹²⁸ Elidawaty Purba and dkk, *Metode Penelitian Ekonomi* (yayasan Kita menulis, 2021).

Jika probabilitas $> \alpha$ 5% maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Jika probabilitas $< \alpha$ 5% maka variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variable dependen. Angka koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang lebih rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen sangat minim.

7. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan keterkaitan secara linear antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Metode ini digunakan untuk memahami arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, termasuk apakah setiap variabel independen memiliki hubungan yang positif atau negatif. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memperkirakan nilai dari variabel dependen ketika nilai variabel independen naik atau turun.¹²⁹ Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas indeks kualitas

¹²⁹ Matondang dan Nasution. hlm. 52.

lingkungan Hidup (X1), dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan (x2) dan indeks pembangunan manusia (X3) terhadap variabel terikat yaitu produk domestik regional bruto (Y). Adapun bentuk persamaan umum regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \varepsilon$$

.....(3.1)

Keterangan:

Y = Variabel terikat atau variabel yang di pengaruhi.

X = Variabel bebas atau yang mempengaruhi

α = Koefisien konstanta

ε = *Error* (tingkat kesalahan)

β = Koefisien Regresi

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah :

$$PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 IKLH_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon \dots \dots \dots (3.2)$$

)

Keterangan:

i = Indeks Observasi

t = Indeks Waktu

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto sektor Pertanian

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

DBH = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar IV.1 Peta Indonesia



Berdasarkan statistik Indonesia tahun 2024, luas wilayah Indonesia adalah 1.904.569 km², dengan jumlah pulau sebanyak 17.380 pulau yang terbagi kedalam 38 provinsi. Indonesia memiliki hutan yang berperan sebagai paru-paru dunia yang keberadaanya berguna dalam menjaga keseimbangan iklim global. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2024, luas daratan Indonesia tercatat sebesar 187 juta Ha, dengan sekitar 95,5 juta Ha atau 51,1 persen masih tertutup hutan. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada dalam kawasan hutan resmi seluas 87,8 juta Ha. Meski demikian, deforestasi masih terjadi dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, luas *deforestasi netto* mencapai 175.400

Ha, naik dibandingkan tahun 2023 yang hanya 121.100 Ha. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya sempat menurun selama periode 2019–2022.

Secara geografis, Kalimantan menjadi wilayah dengan deforestasi tertinggi, mencapai 129.896 Ha. Kalimantan Timur mencatat kehilangan hutan paling luas, yaitu 44.483 Ha, disusul Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selain Kalimantan, deforestasi signifikan juga terjadi di Riau, Jawa Timur, dan Aceh. Tekanan terhadap hutan ini sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan dan aktivitas ekonomi, yang seringkali berdampak negatif pada sektor pertanian, terutama dari segi kerusakan ekosistem, menurunnya kesuburan tanah, dan terganggunya siklus air. Dalam konteks ini, IKLH menjadi indikator penting yang mencerminkan kondisi lingkungan suatu wilayah yang berdampak langsung pada keberlangsungan sektor pertanian.

Dari sisi ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,1 persen pada tahun 2024, didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga. Sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 12 hingga 13 persen terhadap PDB nasional.¹³⁰ Meski pertumbuhan sektor ini hanya sekitar 0,6 persen, peranannya tetap vital dalam menyerap tenaga kerja, menjaga ketahanan pangan, dan menjadi sumber utama ekspor komoditas seperti kelapa sawit. Di tengah dominasi

¹³⁰ Badan Pusat Statistik

sektor industri dan konsumsi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama ekonomi di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah berbasis sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, apabila dikelola dan dialokasikan dengan tepat untuk pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan akses petani, serta pelestarian lingkungan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi cerminan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sektor pertanian secara efisien. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Oleh karena itu, ketiga variabel IKLH, DBH SDA Kehutanan, dan IPM memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi PDRB sektor pertanian, dan dengan memahami hubungan antarvariabel ini, penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kebijakan yang tepat guna mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara berkelanjutan di Indonesia.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian adalah nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan pertanian di suatu daerah dalam periode tertentu. Sektor ini mencakup

berbagai subkategori seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam konteks ekonomi daerah, PDRB sektor pertanian mencerminkan sejauh mana kontribusi sektor ini terhadap perekonomian wilayah tersebut. Daerah dengan basis agraris biasanya memiliki proporsi PDRB sektor pertanian yang tinggi karena sebagian besar penduduknya bergantung pada aktivitas pertanian untuk mata pencaharian. Selain itu, PDRB sektor ini juga menjadi indikator penting dalam melihat ketahanan pangan, kemandirian ekonomi lokal, serta keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap PDRB sektor pertanian penting dilakukan untuk menilai efektivitas pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas lingkungan.

Tabel IV.1 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Daerah Penelitian (Dalam Miliar Rupiah)

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	37.899,52	37.768,08	39.005,09	41.63326,32	42.121,37
Gorontalo	10.478,78	10.663,64	10.907,95	11.365,50	11.719,48
Jatim	167.631,24	170.556,77	173.747,56	177.668,87	177.789,80
Kalbar	32.371,35	33.811,57	34.547,57	35.108,57	36.150,73
Kalteng	21.304,92	22.073,16	22.834,25	23.837,49	24.148,44
Kaltim	33.026,69	33.003,90	33.712,58	34.551,17	35.372,74
Kalut	10.925,64	11.300,51	11.723,08	12.229,93	12.444,24
K. Riau	5.466,78	5.322,05	5.601,86	5.687,63	5.720,17
Lampung	68.312,25	68.679,69	69.317,66	69.691,04	68.236,77
Maluku	7.353,71	7.409,16	7.833,24	8.276,74	8.557,58
NTB	21.466,10	21.712,18	22.187,32	22.642,74	22.992,21

Riau	135.124,21	140.717,74	144.691,04	149.361,11	152.698,39
------	------------	------------	------------	------------	------------

Berdasarkan data PDRB sektor pertanian di 12 provinsi dari tahun 2020 hingga 2024, secara umum terjadi pertumbuhan positif meskipun dengan laju yang bervariasi. Beberapa provinsi seperti Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Maluku menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Provinsi seperti Riau dan Kalimantan Tengah juga mengalami perkembangan yang stabil dengan angka pertumbuhan di atas 2% per tahun. Di sisi lain, Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan rendah dan cenderung stagnan pada 2024, sementara Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur sempat mengalami penurunan di tahun awal, namun kembali pulih pada tahun-tahun berikutnya.

Sebaliknya, beberapa provinsi mengalami perlambatan dan bahkan penurunan. Aceh sempat menurun pada 2021 sebelum kembali tumbuh, dan Lampung mengalami kontraksi pada 2024 sebesar -2,09% setelah pertumbuhan yang lemah di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, sebagian besar provinsi tetap menunjukkan kontribusi sektor pertanian yang cukup signifikan terhadap ekonomi daerahnya. Perbedaan angka pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, kebijakan pemerintah daerah, serta tingkat investasi dan produktivitas di sektor pertanian masing-masing provinsi.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH terdiri dari tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari tahun 2020-2024 rata-rata kondisi kualitas lingkungan hidup di Indonesia berada dalam kondisi cukup baik. Namun, jika dilihat dari tingkat provinsi kondisi lingkungan hidup bervariasi, dimana provinsi yang berada dalam kawasan Indonesia bagian barat terutama pulau Jawa yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia memiliki kondisi kualitas lingkungan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang berada pada kawasan Indonesia bagian timur.

Tabel IV.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Penelitian (Dalam %)

Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	78,99	74,71	73,55	78,53	74,76
Gorontalo	75,31	77,32	79,79	79,52	76,26
Jatim	67,07	68,29	69,92	69,59	73,18
Kalbar	70,07	72,90	71,90	73,73	72,80
Kalteng	72,74	75,11	76,62	75,17	74,80
Kaltim	76,42	75,06	74,46	75,47	78,59
Kalut	78,49	80,85	80,67	80,77	75,59
Kep. Riau	70,51	73,19	74,17	74,26	72,69
Lampung	67,46	68,59	69,10	69,91	62,14
Maluku	75,98	78,23	79,79	79,52	76,26
NTB	70,83	69,89	70,56	71,92	73,12

Riau	69,41	70,72	72,10	70,42	75,97
------	-------	-------	-------	-------	-------

Secara umum, perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di 12 provinsi menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Beberapa provinsi seperti Jawa Timur dan Riau mencatat tren peningkatan yang konsisten, dengan Riau mengalami lonjakan tertinggi sebesar 7,88% pada 2024 setelah sempat menurun. NTB juga menunjukkan tren positif meskipun lambat, dengan pertumbuhan stabil sekitar 1–2% setiap tahun. Sementara itu, Kalimantan Timur mengalami pemulihan signifikan pada 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,13%, setelah dua tahun sebelumnya mencatat penurunan. Gorontalo, Maluku, dan Kalimantan Utara awalnya mencatat peningkatan, namun di 2024 ketiganya mengalami penurunan yang cukup terasa, dengan Kalimantan Utara turun 6,42%.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan di sisi lain, Aceh dan Lampung menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Aceh mengalami penurunan tajam pada 2021 dan 2024, sementara Lampung mencatat penurunan terbesar pada 2024 sebesar 11,12%, yang menjadi angka penurunan tertinggi di antara semua provinsi. Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah juga mengalami fluktuasi kecil tanpa tren yang stabil. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam pengelolaan kualitas lingkungan antar provinsi, di mana beberapa wilayah berhasil

meningkatkan kualitas lingkungannya secara konsisten, sementara lainnya justru mengalami kemunduran di tahun-tahun terakhir.

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan adalah bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah penghasil hutan, yang bersumber dari penerimaan negara atas pemanfaatan hasil hutan seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Tujuan utama skema ini adalah untuk menciptakan keadilan fiskal serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Besaran dana ditentukan berdasarkan jenis hasil hutan, volume produksi, dan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara. DBH Kehutanan menjadi wujud desentralisasi fiskal yang mendorong daerah untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Tabel IV.3 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Daerah Penelitian (Dalam Miliar Rupiah)

Provinsi	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0,37	1,66	0,79	1,16	0,92
Gorontalo	0,78	2,47	0,67	2,88	0,26
Jatim	18,11	46,15	38,48	34,42	33,70
Kalbar	18,82	40,96	20,34	34,71	24,40
Kalteng	122,60	281,17	157,27	169,68	273,27
Kaltim	114,74	248,99	146,18	167,57	214,06
Kalut	11,60	118,83	62,26	55,69	73,60
Kep. Riau	0,85	1,05	0,70	0,43	0,75

Lampung	1,73	8,84	4,18	9,03	6,90
Maluku	25,27	39,33	17,44	21,50	39,41
NTB	1,60	2,53	1,14	2,14	3,15
Riau	110,69	280,28	213,43	202,00	203,33

Berdasarkan perhitungan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan dari tahun 2020 hingga 2024, sebagian besar provinsi mengalami pertumbuhan positif yang cukup stabil. Provinsi dengan pertumbuhan tertinggi adalah Kalimantan Utara, yang mencatatkan CAGR sebesar +57,58%, disusul oleh Lampung dengan +41,63%, dan Aceh sebesar +26,06%. Kenaikan signifikan di provinsi-provinsi ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi dari sektor kehutanan dalam beberapa tahun terakhir, baik karena peningkatan produksi kayu, perbaikan tata kelola, maupun revisi formula pembagian dana pusat ke daerah. Provinsi seperti Jawa Timur, NTB, dan Kalimantan Timur juga menunjukkan pertumbuhan moderat antara 16–18% per tahun.

Namun, tidak semua provinsi mencatatkan pertumbuhan positif. Gorontalo mengalami penurunan DBH kehutanan secara rata-rata sebesar -22,63% per tahun, dan Kepulauan Riau juga mengalami kontraksi kecil sebesar -3,03%. Penurunan ini dapat mencerminkan turunnya aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan, kebijakan konservasi yang lebih ketat, atau perubahan perhitungan alokasi DBH dari pemerintah pusat. Sementara itu, Riau dan Kalimantan Tengah, sebagai provinsi dengan luas kawasan hutan yang besar, tetap

menunjukkan pertumbuhan positif, menandakan bahwa potensi kehutanan masih menjadi penyumbang penting dalam penerimaan daerah.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Manusia merupakan suatu kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, manusia menjadi sasaran dalam pembangunan suatu bangsa. Tujuan utama pembangunan yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Keberhasilan dalam pembangunan manusia dilihat dari seberapa besar permasalahan masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf. antara lain kemiskinan,

Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh UNDP (*The United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*) secara berkala. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan untuk membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Tabel IV.4 Indeks Pembangunan Manusia Daerah Penelitian (Dalam %)

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	71,99	72,18	72,80	73,40	74,04
Gorontalo	68,68	69	69,81	70,45	71,23
Jatim	71,71	72,14	72,75	73,38	74,09
Kalbar	67,66	67,90	68,63	69,41	70,13
Kalteng	71,05	71,25	71,63	72,20	72,73
Kaltim	76,24	76,88	77,44	78,20	78,83
Kalut	70,63	71,19	71,83	72,49	73,02
Kep. Riau	75,59	75,79	76,46	77,11	77,97
Lampung	69,69	69,90	70,45	71,15	71,81
Maluku	69,49	69,71	70,22	70,94	71,57
NTB	68,25	68,65	69,46	70,20	70,93
Riau	72,71	72,94	73,52	74,04	74,79

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh provinsi menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, kenaikan IPM selama lima tahun ini berada di kisaran 2,35% hingga 3,92%. Provinsi dengan pertumbuhan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami peningkatan IPM sebesar 3,92%, diikuti oleh Gorontalo dan Kalimantan Barat dengan kenaikan masing-masing sekitar 3,7% dan 3,64%. Sementara itu, provinsi Kalimantan Tengah mencatat pertumbuhan terendah sebesar 2,35%. Angka ini menandakan adanya perbaikan yang stabil dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat di berbagai daerah.

Meskipun persentase kenaikan IPM terlihat kecil jika dibandingkan dengan sektor ekonomi, namun pertumbuhan ini tetap penting karena mencerminkan kemajuan kualitas hidup yang berkelanjutan. Pertumbuhan moderat ini juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada peningkatan ekonomi semata, tetapi juga pada faktor-faktor sosial dan layanan publik yang terus ditingkatkan. Dengan demikian, data ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat provinsi berjalan dengan baik dan menunjukkan tren positif sepanjang periode tersebut.

C. Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean*, *sum*, *minimun*, *standar deviasi* dan mengukur distribusi apakah normal atau tidak dengan ukuran *skewness* atau *kurtosis*.

Tabel IV.5 Statistik Deskriptif

	PDRB	IKLH	DBH	IPM
Mean	48008.13	74.00783	55.74462	72.17533
Median	28259.89	74.21500	18.46500	71.76000
Maximum	177789.8	83.75000	281.1700	78.83000
Minimum	5322.050	62.14000	0.260000	67.66000
Std. Dev.	53204.20	4.092851	79.47098	2.758539
Skewness	1.487586	-0.120061	1.538125	0.649487
Kurtosis	3.751470	3.049329	4.124566	2.730192
Sum	2880488.	4440.470	3344.677	4330.520
Sum Sq. Dev.	1.67E+11	988.3344	372622.6	448.9627

Observations	60	60	60	60

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan data pada tabel IV.5 diatas diperoleh informasi mengenai variabel penelitian yaitu:

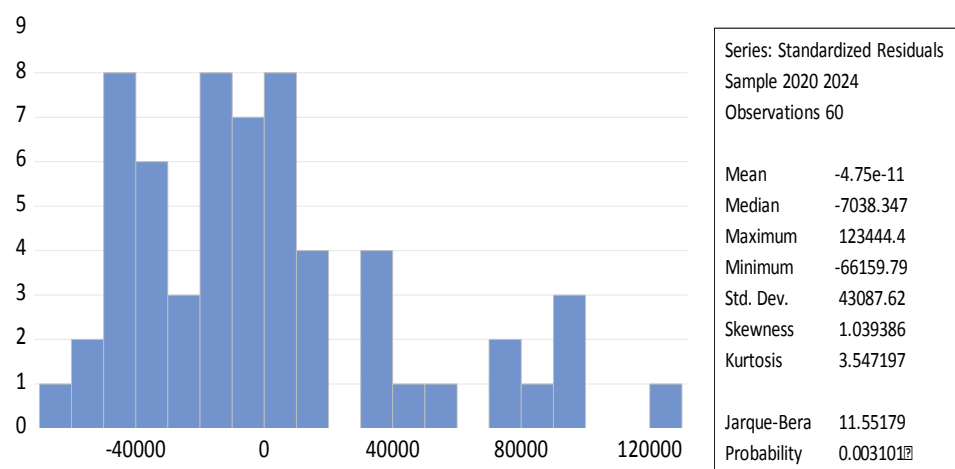
- a. Pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, diperoleh nilai maksimum sebesar 177.789,8, nilai minimum sebesar 5.322,05, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 48.008,13, serta nilai standar deviasi sebesar 53.204,20, dengan total keseluruhan data penelitian sebanyak 60 data.
- b. Pada variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), nilai maksimum tercatat sebesar 83,75, nilai minimum sebesar 62,14, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 74,01, serta nilai standar deviasi sebesar 4,09, dengan total keseluruhan data penelitian sebanyak 60 data.
- c. Selanjutnya, pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan, nilai maksimum sebesar 281,17, nilai minimum sebesar 0,26, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 55,74, serta nilai standar deviasi sebesar 79,47, dengan total keseluruhan data penelitian sebanyak 60 data.
- d. Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai maksimum tercatat sebesar 78,83, nilai minimum sebesar 67,66, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 72,18, serta nilai standar deviasi

sebesar 2,76, dengan total keseluruhan data penelitian sebanyak 60 data.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan yang akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau tidak normal sama sekali. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat asymptotic. Dengan ketentuan bila *probability* dari $JB > 0,05$ maka data terdistribusi normal.

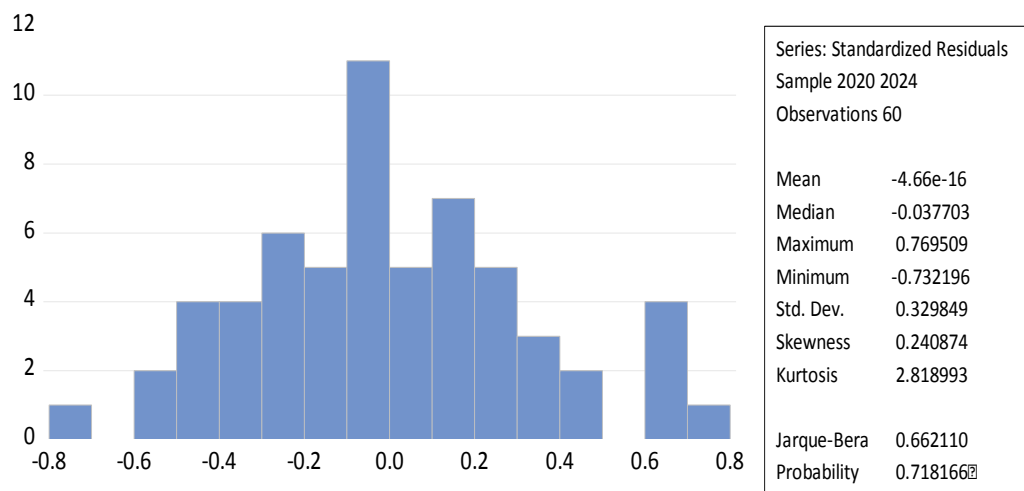
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan gambar IV.2, nilai prob jb sebesar $0.003101 < 0,05$, artinya data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak normal maka dilakukan pengobatan dengan membuat LOG.¹³¹ Sehingga hasil normalitasnya setelah dilogkan dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar IV.3 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan gambar IV.3 diatas hasil *Histogram Normality test* diatas dapat dilihat pada nilai *probability Jarque-Bera* nya > 0.05 . Hasil dari *Probability Jarque-Bera* nya sebesar $0.718166 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa data tersebut dinyatakan berdistribusi normal.

3. Model Data Panel

a. *Common Effect* (CE)

Teknik *common effect* menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk

¹³¹ Zulaika Matondang Dan Hamni Fadilah, *Praktik Analisis Data: Pengelolaan Ekometrika Dengan Eviews Dan SPSS*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021), hlm.27.

mengestimasi model data panel tersebut. Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antar silang tempat dan titik waktu karena dapat memiliki *intercept* yang tetap, dan bukan bervariasi secara *random*. Untuk model *common effect* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.6 Hasil Model Regresi *Common Effect*

Dependent Variable: LOG_PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/28/25 Time: 11:03
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.50035	5.882957	3.994649	0.0002
LOG_IKLH	-11.45434	1.837618	-6.233252	0.0000
LOG_DBH	0.198104	0.049860	3.973172	0.0002
LOG_IPM	1.146709	2.730809	0.419916	0.6762
R-squared	0.476134	Mean dependent var		4.446457
Adjusted R-squared	0.448070	S.D. dependent var		0.455728
S.E. of regression	0.338569	Akaike info criterion		0.736164
Sum squared resid	6.419229	Schwarz criterion		0.875787
Log likelihood	-18.08492	Hannan-Quinn criter.		0.790778
F-statistic	16.96585	Durbin-Watson stat		0.324660
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

b. Fixed Effect

Pada asumsi ini, variasi terletak pada individu yang faktor waktunya diabaikan sehingga model regresi yang digunakan adalah regresi *dummy* untuk mengungkapkan adanya perbedaan intersep. Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan

keadaan yang sesungguhnya. Untuk model *Fixed Effect* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.7 Hasil Model Regresi *Fixed Effect*

Dependent Variable: LOG_PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/28/25 Time: 11:05
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
LOG_IKLH	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165
LOG_DBH	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
LOG_IPM	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999724	Mean dependent var	4.446457
Adjusted R-squared	0.999639	S.D. dependent var	0.455728
S.E. of regression	0.008663	Akaike info criterion	-6.447129
Sum squared resid	0.003377	Schwarz criterion	-5.923542
Log likelihood	208.4139	Hannan-Quinn criter.	-6.242325
F-statistic	11658.70	Durbin-Watson stat	0.948676
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

c. *Random Effect*

Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah dengan menambah variabel gangguan yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar provinsi. Berikut adalah regresi model *Random Effect*:

Tabel IV.8 Model Regresi *Random Effect*

Dependent Variable: LOG_PDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/28/25 Time: 11:06
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.050835	0.424244	-2.476959	0.0163
LOG_IKLH	0.249648	0.102922	2.425618	0.0185
LOG_DBH	-0.002198	0.003185	-0.690232	0.4929
LOG_IPM	2.708830	0.228430	11.85844	0.0000

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.344427	0.9994
Idiosyncratic random		0.008663	0.0006

Weighted Statistics			
R-squared	0.730222	Mean dependent var	0.050013
Adjusted R-squared	0.715770	S.D. dependent var	0.017646
S.E. of regression	0.009408	Sum squared resid	0.004956
F-statistic	50.52608	Durbin-Watson stat	0.645074
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.018413	Mean dependent var	4.446457
Sum squared resid	12.47919	Durbin-Watson stat	0.000256

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

4. Uji Pemilihan Model

Untuk menentukan model regresi data panel yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian, perlu dilakukan uji spesifikasi model untuk memilih model regresi terbaik dari ketiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji spesifikasi model tersebut antara lain :

a. Uji Chow

Uji *Chow* diperlukan untuk menentukan model yang paling tepat antara CEM dengan FEM, dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \text{common effect}$

$H_1 = \text{fixed effect}$

Jika nilai probabilitas $< \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang tepat dan cocok digunakan adalah *fixed effect*, sedangkan jika nilai probabilitas $> \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak model yang tepat dan cocok digunakan adalah *common effect*.

Tabel IV.9 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7771.357194	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	452.997549	11	0.0000

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil Uji *Chow* pada tabel IV.9, menunjukkan bahwa nilai *probability cross section chi square* menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi, yaitu $0.0000 < 0,05$. Sehingga model regresi sementara yang tepat dalam penelitian ini yakni FEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman diperlukan untuk menentukan model yang paling tepat diantara REM dan FEM, hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah

$H_0 = \text{random effect}$

$H_1 = \text{fixed effect}$

Jika nilai probabilitas $< \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang tepat dan cocok digunakan adalah *fixed effect model* (FEM), sedangkan jika nilai probabilitas $> \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak model yang tepat dan cocok digunakan adalah *random effect model* (REM).

Tabel IV.10 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.036725	3	0.0046

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji Hausman pada tabel IV.10 menunjukkan bahwa nilai *probability cross section random* menunjukkan angka lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi, yaitu $0.0046 < 0.05$. Sehingga model regresi yang tepat dan terbaik dalam penelitian ini yakni *Fixed Effect Model*.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinieritas

	LOG_IKLH	LOG_DBH	LOG_IPM
LOG_IKLH	1.000000	0.102654	0.096108
LOG_DBH	0.102654	1.000000	0.165116
LOG_IPM	0.096108	0.165116	1.000000

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Uji Multikolinieritas data panel dapat dilihat melalui tabel *Auxiliary regression*, dimana jika diantar variabel bebasnya diatas 0.80 maka terjadi mutikolinieritas. Akan tetapi jika antar variabel bebasnya dibawah dari 0.80 maka penelitian bebas dari mutikolinieritas. Berikut hasil *auxiliary regression* tabel. Dari hasil uji multikolinieritas diatas dapat dilihat variabel bebasnya tidak melebihi 0.80 berarti hasil data ini tidak terjadi mutikolinieritas.

b. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini terjadi karena residual (kesalahan gangguan). Untuk hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabe sebagai berikut:

Tabel IV.12 Hasil Uji Autokolerasi

Mean dependent var	4.446457
S.D. dependent var	0.455728
Akaike info criterion	-6.447129
Schwarz criterion	-5.923542
Hannan-Quinn criter.	-6.242325
Durbin-Watson stat	0.948676

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel IV.12, hasil uji autokolerasi diatas terdapat nilai durbin watson (DW) sebesar 0.948676, dan -2 kurang dari nilai DW 0.948676 kurang dari +2. Sehingga dapat dijelaskan $-2 < 0.948676 < +2$. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokolerasi dalam penelitian ini.

6. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah koefisien regresi berpengaruh signifikan atau tidak maka perlu dilakukan uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi, uji t-statistik, dan uji F-statistik.

1) Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dengan melihat nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi antara 0 – 1, semakin mendekati angka 1 maka pengaruh variabel bebas semakin besar dalam menjelaskan variabel terikat. Dalam model regresi nilai koefisien determinasi dapat dilihat menggunakan nilai *R-squared*.

Tabel IV.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.999724
Adjusted R-squared	0.999639
S.E. of regression	0.008663
Sum squared resid	0.003377
Log likelihood	208.4139
F-statistic	11658.70
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.999639 maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Bersamaan) sebesar 99,9% sedangkan sisanya sebesar 0,1% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

2) Uji t-statistik

Tabel IV.14 Hasil Uji t-Statistik

Dependent Variable: LOG_PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/28/25 Time: 11:10
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
LOG_IKLH	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165
LOG_DBH	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
LOG_IPM	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

- a) Variabel IKLH memiliki nilai t-statistic sebesar 2.490861 dengan nilai prob.(signifikansi) sebesar $0.0165 < 0.05$ maka

ditarik kesimpulan bahwa variabel IKLH berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Indonesia.

- b) Variabel DBH-SDA Kehutanan memiliki nilai t-statistic sebesar -0.736325 dengan nilai prob.(signifikansi) sebesar $0.4654 > 0.05$ maka ditarik kesimpulan bahwa variabel DBH SDA Kehutanan tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Indonesia.
- c) Variabel DBH-SDA Kehutanan memiliki nilai t-statistic sebesar 11.84530 dengan nilai prob.(signifikansi) sebesar $0.0000 < 0.05$ maka ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Indonesia.

3) Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh secara Bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.

Tabel IV.15 Hasil Uji F-Statistik

R-squared	0.999724
Adjusted R-squared	0.999639
S.E. of regression	0.008663
Sum squared resid	0.003377
Log likelihood	208.4139
F-statistic	11658.70
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Diketahui nilai f statistik 11658.70 dengan nilai prob (fstatistik) sebesar $0.000000 < 0,05$ maka ditarik kesimpulan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil

(DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian.

7. Analisis Data Panel

Tabel IV.16 Hasil Uji Data Panel

Dependent Variable: LOG_PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/28/25 Time: 11:10
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
LOG_IKLH	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165
LOG_DBH	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
LOG_IPM	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel di atas dari hasil output maka model analisis regresi berganda antara variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditransformasikan dalam model persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB)}_{it} = & -1.060913 + 0.256434 (\text{IKLH})_{it} - 0.002346 \\ & \text{LOG(DBH)}_{it} + \\ & 2.707517\text{LOG(IPM)}_{it}\dots\dots\dots(4.1) \end{aligned}$$

Konstanta model regresi sebesar -1,060913 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (IKLH, DBH, dan IPM) bernilai nol, maka PDRB sebesar -1,060913. Koefisien IKLH sebesar

0,256434 menandakan bahwa peningkatan IKLH satu satuan akan menaikkan PDRB sebesar 0,256434. Sebaliknya, koefisien DBH bernilai -0,002346, yang berarti kenaikan DBH 1% justru menurunkan PDRB sebesar 0,002346%. Sementara itu, IPM memiliki koefisien terbesar, yaitu 2,707517, sehingga peningkatan IPM 1% dapat meningkatkan PDRB sebesar 2,707517%. Dengan demikian, IPM memiliki pengaruh paling besar terhadap PDRB, diikuti IKLH, sedangkan DBH berpengaruh negatif.

8. Intersep Data Penelitian

Adapun intersept data penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.17 *Intersept Fixed Effect*

Dependent Variable: PDRB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 10/13/25 Time: 15:31
 Sample: 2020 2024
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 12
 Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
IKLH?	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165
DBH?	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
IPM?	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	0.132829			
_GORONTALO--C	-0.374401			
_JATIM--C	0.789222			
_KALBAR--C	0.149517			
_KALTENG--C	-0.081676			
_KALTIM--C	-0.001207			
_KALUT--C	-0.379375			
_KEPRI--C	-0.772900			
_LAMPUNG--C	0.425987			

_MALUKU--C	-0.528057
_NTB--C	-0.054454
_RIAU--C	0.694516

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel IV.17 diatas maka hasil intersep yaitu sebagai berikut:

1. $PDRB_ACEH = 0.132829 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Aceh) - 0.002346(DBH_Aceh) + 2.707517(IPM_Aceh)$
2. $PDRB_GORONTALO = -0.374401 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Gorontalo) - 0.002346(DBH_Gorontalo) + 2.707517(IPM_Gorontalo)$
3. $PDRB_JATIM = 0.789222 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Jatim) - 0.002346(DBH_Jatim) + 2.707517(IPM_Jatim)$
4. $PDRB_KALBAR = 0.149517 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Kalbar) - 0.002346(DBH_Kalbar) + 2.707517(IPM_Kalbar)$
5. $PDRB_KALTENG = -0.081676 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Kalteng) - 0.002346(DBH_Kalteng) + 2.707517(IPM_Kalteng)$
6. $PDRB_KALTIM = -0.001207 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Kaltim) - 0.002346(DBH_Kaltim) + 2.707517(IPM_Kaltim)$
7. $PDRB_KALUT = -0.379375 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Kalut) - 0.002346(DBH_Kalut) + 2.707517(IPM_Kalut)$
8. $PDRB_KEPRI = -0.772900 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Kepri) - 0.002346(DBH_Kepri) + 2.707517(IPM_Kepri)$
9. $PDRB_LAMPUNG = 0.425987 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Lampung) - 0.002346(DBH_Lampung) + 2.707517(IPM_Lampung)$
10. $PDRB_MALUKU = -0.528057 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_Maluku) - 0.002346(DBH_Maluku) + 2.707517(IPM_Maluku)$
11. $PDRB_NTB = -0.054454 - 1.060913 + 0.256434(IKLH_NTB) - 0.002346(DBH_NTB) + 2.707517(IPM_NTB)$

$$12. \text{PDRB_RIAU} = 0.694516 - 1.060913 + 0.256434(\text{IKLH_Riau}) - 0.002346(\text{DBH_Riau}) + 2.707517(\text{IPM_Riau})$$

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian

Berdasarkan hasil penelitian ini, terbukti bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori jasa lingkungan dan teori produksi, yang menyatakan bahwa ketika kualitas lingkungan (udara, air, tanah, dan ekosistem) membaik, maka input alam seperti kesuburan tanah, ketersediaan air irigasi, dan pengendalian hama alami menjadi lebih efektif, mengurangi kerugian produksi dan meningkatkan hasil.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berhubungan positif dengan PDRB sektor pertanian karena kualitas udara, air, tanah, serta kesehatan ekosistem merupakan faktor produksi utama yang menentukan produktivitas pertanian, semakin baik kondisi lingkungan, semakin optimal fungsi kesuburan tanah, ketersediaan air, dan stabilitas ekosistem, sehingga dapat meningkatkan hasil panen, efisiensi penggunaan input, dan akhirnya mendorong pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan memberi kontribusi terhadap keberlanjutan produksi

pertanian dan efisiensi pengelolaan sumber daya, meskipun tingkat pengaruhnya dapat bervariasi antar daerah.¹³²

Menurut perspektif Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi untuk memelihara dan mengelola sumber daya alam secara bijak, sehingga menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual (QS. Al-Baqarah [2]:30). Islam juga menekankan larangan melakukan kerusakan (*fasad*) di bumi yang dapat merugikan kehidupan manusia (QS. Al-A'raf [7]:56), serta menegaskan bahwa bumi dan segala isinya disediakan sebagai rezeki bagi manusia, termasuk untuk pertanian, sehingga lingkungan yang terjaga mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat (QS. Al-Mulk [67]:15).¹³³

Hasil ini sama dengan hasil penelitian dari Winar Wahyu Prastanika, *The Impact of Environmental Changes on Agricultural Output in Indonesia (1990-2021)* yang menunjukkan bahwa variabel lingkungan secara jangka panjang berpengaruh terhadap *output* pertanian.¹³⁴ Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Tarmizi Abbas dan Nurhayati menegaskan bahwa investasi dan belanja pemerintah yang

¹³² Bagus Prakoso, "Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH) Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Di Indonesia (Studi Kasus Pada 13 Provinsi Tahun 2011-2019)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2022.

¹³³ Muslim Djuned, Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Vol.2; No.2, (2023) Hlm; 124-134.

¹³⁴ Winar Wahyu Prastanika et al., "The Impact of Environmental Changes on Agricultural Output in Indonesia: A Case Study of the Years 1990–2021," in *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 3, no. 1 (2023): 687–696, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1772>

sering berkaitan dengan dukungan lingkungan memiliki efek positif terhadap PDRB pertanian.¹³⁵

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-SDA Kehutanan) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan (DBH SDA Kehutanan) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Secara ekonomi, dapat dipahami karena DBH SDA Kehutanan merupakan transfer dari pemerintah pusat yang penggunaannya bersifat umum di daerah bukan diarahkan khusus untuk sektor pertanian, misalnya untuk pelayanan publik, infrastruktur umum, alih-fungsi lahan, dan bukan langsung ke program produktivitas pertanian. Keterlambatan penyaluran, alokasi yang tidak spesifik, serta variasi besar antar daerah turut melemahkan pengaruhnya terhadap produktivitas pertanian.

Hubungan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan (DBH SDA Kehutanan) dengan PDRB sektor pertanian dan lebih luas, PDRB telah diteliti dalam literatur akademik. Beberapa hasil penelitian terbaru memperkuat argumen bahwa DBH SDA tidak selalu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB di banyak daerah. Misalnya, dalam studi empiris berjudul *Local government development policy: Natural resource revenue sharing and*

¹³⁵ Tarmizi Abbas, Nurhayati M, "Pengaruh Faktor-Faktor Riil Ekonomi Terhadap Pdrb Pertanian Indonesia" *jurnal ekonomi pertanian Unimal*, Vol.4, No. 1 (2021)

economic growth in Indonesia (menganalisis 491 kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2012) ditemukan bahwa DBH SDA tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, faktor pendorong utama pertumbuhan justru adalah alokasi dari Dana Alokasi Umum (DAU).¹³⁶

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya publik harus berorientasi pada keadilan distribusi dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Ketika dana publik seperti DBH SDA tidak meningkatkan sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi sebagian besar masyarakat hal tersebut menunjukkan belum tercapainya prinsip distribusi yang adil. Hal ini sesuai dengan QS. *Al-Hasyr* ayat 7 yang menegaskan bahwa harta publik harus dikelola agar “tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”¹³⁷

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai *al-‘umrān* juga menekankan bahwa kemakmuran masyarakat sangat bergantung pada kebijakan negara dalam mengalokasikan harta publik secara benar dan mendukung sektor produktif. Jika dana negara tidak mendukung sektor yang menjadi basis ekonomi rakyat, maka pertumbuhan tidak akan terjadi secara optimal.¹³⁸ Hal ini selaras dengan temuan penelitian

¹³⁶ Bachtari Alam Hidayat, Local government development policy: Natural resource revenue sharing and economic growth in Indonesia, *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 2024, 8(15), 10375

¹³⁷ Al-Qur’an, QS. Al-Hasyr: 7.

¹³⁸ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, pembahasan mengenai *al-‘umrān* dan peran negara dalam distribusi harta

bahwa dana DBH SDA belum mampu menjadi pendorong langsung bagi pertumbuhan sektor pertanian.

Hasil ini sama dengan penelitian Miftahur Rusyda, Aji Sofyan Effendi dan Diana Lestari yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pola hubungan negatif dengan DBH SDA.¹³⁹ Dengan demikian, temuan DBH SDA tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian sejalan dengan rangkaian bukti empiris bahwa dana bagi hasil sumber daya alam termasuk DBH SDA sering kali tidak mampu mendorong pertumbuhan PDRB secara langsung.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian. Hasil ini dapat dijelaskan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan mutu sumber daya manusia melalui tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan tingkat kehidupan. Individu yang sehat, terdidik, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik cenderung lebih produktif dalam kegiatan pertanian. Peningkatan kualitas manusia juga mempercepat adopsi teknologi baru, penerapan praktik

¹³⁹ Miftahur Rusyda, and dkk, "Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil SDA, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Timur" *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5, No. 2 (June 2024)

pertanian modern, serta efisiensi dalam manajemen bisnis pertanian. Oleh karena itu, peningkatan IPM secara langsung berpengaruh pada peningkatan produksi pertanian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhubungan positif dan signifikan dengan PDRB sektor pertanian karena semakin tinggi IPM suatu daerah, semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk memaksimalkan sumber daya alam dan teknologi, sehingga sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuan ini mendukung teori modal manusia yang menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah aset utama dalam pertumbuhan ekonomi.¹⁴⁰

Menurut perspektif Islam, pengembangan kualitas manusia merupakan amanah untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan memungkinkan individu mengelola pertanian secara efisien dan memanfaatkan sumber daya alam secara halal dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan firman Allah bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]:30). Menurut Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, khalifah bertanggung jawab menjaga keberlanjutan bumi dan memanfaatkan rezeki Allah untuk kesejahteraan (*maslahah*). Dengan demikian,

¹⁴⁰ Todaro, M. P., & Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kesembilan, Jilid 1). Terjemahan: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2016

peningkatan kualitas manusia mendukung produktivitas ekonomi sekaligus menjalankan amanah Allah yang membawa keberkahan.¹⁴¹

Hasil ini sama dengan hasil penelitian dari Sucipto Dewantoro yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Sektor Pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB sektor Pertanian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dikarenakan faktor pendidikan, pengetahuan dan kesehatan sangat penting bagi pelaku sektor pertanian dalam mengembangkan pengelolaan pertanian.¹⁴² Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Diana Indah Parkah, Syamsul Huda dan Putra Perdana yang dilakukan di provinsi Jawa Timur dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Sektor Pertanian.¹⁴³

4. Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian di Indonesia

¹⁴¹ Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Pemeliharaan Lingkungan dalam Syariat Islam). Kairo: Dar al-Shuruq. (2016)

¹⁴² Sucipto Dewantoro, *Impak Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Luas Lahan Sawah, Dan Pekerja Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto (Pdrb) Sektor Pertanian Di Jawa Barat*, *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)

¹⁴³ Diana Indah Parkah and dkk, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 23, No. 1 (2023).

Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tiga variabel penting yang secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. IKLH mencerminkan kualitas lingkungan seperti udara, air, dan tutupan lahan yang secara langsung memengaruhi produktivitas pertanian, karena lingkungan yang baik mendukung pertumbuhan tanaman dan keberlanjutan lahan. DBH SDA Kehutanan, sebagai dana transfer dari pemerintah pusat, meskipun tidak secara langsung dialokasikan untuk sektor pertanian, dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur dan program yang menunjang pertanian jika dikelola dengan tepat. Sementara itu, IPM menggambarkan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang lebih baik memungkinkan petani mengadopsi teknologi dan praktik pertanian yang lebih efisien. Oleh karena itu, ketiga variabel ini secara bersama-sama mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian di daerah, yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Menurut perspektif Islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, dan mengembangkan kualitas dirinya agar kemaslahatan (*maslahah*)

tercapai. Pemikir Islam seperti Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, serta mengingatkan bahwa pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara adil dan tidak merusak bumi.¹⁴⁴ Begitu pula Sayyid Qutb menekankan bahwa amanah manusia di bumi mencakup tanggung jawab untuk memelihara lingkungan dan mengoptimalkan sumber daya demi kesejahteraan umat.¹⁴⁵ Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan, sumber daya manusia, dan pengelolaan dana alam secara bijak tidak hanya mendukung produktivitas ekonomi sektor pertanian, tetapi juga merupakan pelaksanaan amanah Allah di bumi yang membawa keberkahan bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip Islam tentang keseimbangan alam dan pemanfaatan rezeki secara berkelanjutan (QS. Al-Baqarah [2]:30).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Diana Indah Parkah, Syamsul Huda dan Putra Perdana yang menyatakan bahwa Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi secara simultan berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian.¹⁴⁶ Selain itu, penelitian Tino Handayani, Didik Susetyo dan M. Syirod Saleh juga menunjukkan bahwa Belanja modal, infrastruktur jalan panjang, dan IPM secara

¹⁴⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (2015)

¹⁴⁵ Qutb, Sayyid. (2000). *Fi Zhilal al-Qur'an* (Dalam Naungan Al-Qur'an). Kairo: Dar al-Syuruq.

¹⁴⁶ Diana Indah Parkah and dkk, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 23, No. 1 (2023).

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Variabel infrastruktur jalan panjang dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB.¹⁴⁷

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan panduan yang telah ditentukan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan agar dapat memperoleh hasil yang baik. Namun bukanlah mudah untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian ini sehingga ada beberapa keterbatasan yang peneliti hadapi dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Saat mengumpulkan data di BPS tidak bisa diambil secara bersama-sama. Karena setiap variabel memiliki data yang berpisah pisah.
2. Peneliti melakukan penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel variabel tertentu saja dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian
3. Keterbatasan wawasan yang dimiliki peneliti.

¹⁴⁷ Tino Handayani and dkk, "Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 15, N (2017): 92–100.

4. Penelitian ini dilakukan pada periode yang relatif singkat yaitu selama 5 tahun (2020-2024) dan sebanyak 12 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan data panel.

Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, peneliti berusaha semaksimal mungkin agar hasil penelitian ini tidak mengurangi makna penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi tentang dampak Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian di Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor (PDRB) Pertanian di Indonesia.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor (PDRB) Pertanian di Indonesia.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor (PDRB) Pertanian di Indonesia.
4. IKLH, DBH SDA Kehutanan dan IPM secara simultan berpengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor (PDRB) Pertanian di Indonesia.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sektor pertanian di Indonesia tahun 2020–2024, maka kesimpulan yang ditarik memiliki implikasi yaitu adanya pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap PDRB sektor pertanian, di mana

IKLH terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian, sehingga diperlukan upaya pelestarian lingkungan secara konsisten dan terintegrasi dalam pembangunan sektor pertanian.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, sehingga perlu evaluasi dalam pengalokasiannya agar lebih tepat sasaran. Pemerintah disarankan mengarahkan DBH untuk program pertanian di sekitar kawasan hutan, seperti *agroforestry*, pelatihan petani, dan infrastruktur pertanian terpadu. Pengelolaan ini perlu mengintegrasikan aspek pelestarian ekosistem agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini juga mendukung konsep *Environmental Kuznets Curve*, di mana pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan dapat berjalan beriringan jika ditangani dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan DBH sebaiknya diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan pertanian dilakukan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu menjaga daya dukung ekosistem dalam jangka panjang.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian.

Implikasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mendorong kemajuan sektor pertanian. Pemerintah dan pihak terkait perlu terus meningkatkan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan petani agar mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan teknologi pertanian secara optimal.

4. Pembangunan sektor pertanian memerlukan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya dari sisi lingkungan dan manusia, tetapi juga dari sisi kebijakan fiskal yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kolaborasi antara sektor lingkungan, pendidikan, dan keuangan menjadi kunci utama dalam memperkuat sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, penting untuk melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dengan lebih tepat dan fokus pada pengembangan pertanian, perbaikan kualitas lingkungan, serta program pendukung bagi petani seperti membuat ekowisata atau menambah penghasilan hutan melalui pengembangan ternak lebah untuk menghasilkan madu yang menambah pendapatan serta menjaga ekosistem tetap terjaga, agar dana tersebut benar-benar

berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian.

2. Bagi masyarakat, terutama pelaku di bidang pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting yang perlu terus di tingkatkan melalui pendidikan, pelatihan dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk produktivitas dan daya saing yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Bagi peneliti dimasa mendatang, studi ini bisa diperluas dengan menambahkan variabel lain seperti ukuran lahan, inovasi dalam pertanian, investasi dan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh dan mampu merefleksikan perubahan dalam sektor pertanian secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail Soesana and dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (yayasan Kita menulis, 2023).
- Achamd Nur Hidayat and Nofrian Bakarudin, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Addinul Yakin, *Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan: Teori Dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan* (Akademika Pressindo, 1999).
- Akhmad Yani, Restiatun, “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Determinannya: Studi Kasus di Indonesia” *Jurnal FEB UNILA*, Vol.3 No.5. 2023
- Aln Pujo Priambodol and Nur Wahyu Hidayat, “Pengaruh PAD, DAU, DBH, Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Dan Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 8, No. 1 (2024): 1–14.
- Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Andre Budihardjo and dkk, “PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018),” *Journal of Economics* Vol. 9, No (2020): 1–9.
- Anisah Meilynda, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap PDRB Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan” (Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi, 2024).
- Ardian and Dkk, “Pengaruh Pengembangan Ekonomi Sosial Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal Bappenas Working Papers* IV (2023): 21.
- Ardiyanto Maksimilianus and dkk, *Ekonomi Pembangunan, Teori Dan Praktik Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global* (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).¹ Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). *Economic Development* (12th ed), (2015)
- Arsyad, *Ekonomi Pembangunan (Edisikelima)* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2016).
- Aulia Wafa, “Analisis Determinan Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Economics, Finance, and Business Review* Vol. 1, No (2024): 1–11.
- Badan Pusat Statistik “*Indeks Pembangunan Manusia 2023*”
- Badan Pusat Statistik, “*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*”, 2023
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Pertanian 2023*, vol 34, 2024

- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*, (2023).
- Bagas Prakoso, “Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH), Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).
- BPS, *Statistik Lingkungan Hidup*, vol 43, 2024
- Bungin and B., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, 2015).
- Dani Nur Saputra and dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian* (Feniks Muda Sejahtera, 2022).
- Darwis Harahap and dkk, “Determinants of Development Inequality between Regions in North Sumatra Province,” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* Vol. 8, No. (2022): 252–53.
- Dementierian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. QS. Al-A’raf(7), 2019).
- Diana Indah Parkah and dkk, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 23, No. 1 (2023).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, “*Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*” 2017.
- Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, “*Laporan Dana Transfer Daerah*”, 2023
- Dwi Fazriani Ashal, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil (DBH) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2022” (2024).
- Eka Intan Kumala Putri and Nuva Maresfin, *Ekonomi Lingkungan: Tinjauan Teoritis Dan Kajian Praktis* (Bogor: IPB Press, 2022).
- Elidawaty Purba and dkk, *Metode Penelitian Ekonomi* (yayasan Kita menulis, 2021).
- Faguet, Jean-Paul, *Decentralization and Governance*. In: *The Oxford Handbook of Governance*. Oxford University Press, (2016).
- Heniwati Gulo, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Hasil Penelitian Dan

Pengabdian Kepada Masyarakat” (Universitas Islam Kuantan Singingi, 29-30 November 2022, 2022).

Ida Bagus Made Agung and Mutiara Kartika Dewi, *Ekonomi Pembangunan Pertanian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Indah Diana Parkah, Syamsul Huda, and Putra Perdana, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia(IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 25, No. 1 (2025): 115–21.

Irwan Suharni, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Selatan,” *Jurnal Ekonomi*, 2021, 15.

Izzatul Ummi, “Hubungan Sektor-Sektor Pdrb Dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2012-20217” (Universitas Negeri Semarang, 2019).

Jackson and T, *Kemakmuran Tanpa Pertumbuhan: Fondasi Bagi Ekonomi Masa Depan (Edisi Kedua)*, 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional*. Jakarta: KLHK, (2022).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia*”, 2023

Kurniawan, “Pembangunan Ekonomi Industrialisasi Dan Degradasi Lingkungan Hidup Di Indonesia Eviromental Kunzet Curve Model,” *Jurnal Ekonomi* VII. No. 9 (2019): 35.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Andi Offest, 2019).

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Harlow: Pearson Education, 2020), 531–533.

Muhammad Garibaldi, “Analisis Hubungan IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, No. 2 (2019): 12.

Muhammad Min Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks Tersejemah Dan Tafsir* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

Muhammad Roby Setiawan, “Analisis Pengaruh Beberapa Sektor PDRB Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vo. 19, No (2022): 53–62.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

- Nur Arifatul Ulya, Syafrul Yunardy, "Analisis Peranan Sektor Kehutanan Dalam Perekonomian Indonesia: Sebuah Pendekatan Model Input-Output" *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 2021
- Nurul Huda and Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Panayotou, "Demystifying the Environmental Kuznets Curve: Turning a Black Box into a Policy Tool". In: *The Environmental Kuznets Curve: A Primer*. World Bank. 2017
- Prakoso, "Analisis Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH) Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Di Indonesia (Studi Kasus Pada 13 Provinsi Tahun 2011-2019)." *Jurnal Ekonomi* 1, No. 11 (2020).
- Quarthano Reavindo, "Pengaruh Luas Lahan Sawah Dan Tenaga Kerja Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten Langkat," *Jurnal Ekonomi* 1, No. 11 (2020).
- Rafidah Azmi, "Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Labuhanbatu" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).
- Rahman and Setiawan, "Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kehutanan Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian," *Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* Vol. 7, No (2019): 45–58.
- Roby Setiawan, "Analisis Pengaruh Beberapa Sektor PDRB Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia."
- Rosana, Alan. "Pengaruh Pembangunan Sektoral terhadap Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengaruhnya terhadap Kesehatan Penduduk di Indonesia Tahun 2013–2022." Skripsi, Universitas Siliwangi, 2024.
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sihombing and R, *No Title Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (Salemba Empat, 2016).
- Simarmata, *Ekonomi Sumber Daya Alam* (Medan: yayasan Kita menulis, 2021).
- Sofyani, H, and Anggadini S.D, *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Praktik, Dan Riset Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Sopan Adrianto and Helena Ras Ulina Sembiring, *Memposisikan Human Capital Menuju Indonesia Tangguh Dan Tumbuh* (Elex Media Komputindo, 2022).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2024).

- Sucipto Dewantoro, Impak Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Luas Lahan Sawah, Dan Pekerja Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto (Pdrb) Sektor Pertanian Di Jawa Barat, *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)
- Tafsir al-Muyassar, Departemen Agama Republik Indonesia, 2017.
- Tara May Sabilla and Hadi Sumarsonp, “Pengaruh Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB,” *Jurnal Feb UNMUL, FORUM EKONOMI* Vol. 24, N (2022): 54–64.
- Tino Handayani and dkk, “Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 15, N (2017): 92–100.
- Todaro, M. P., & Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kesembilan, Jilid 1). Terjemahan: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2016
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1)
- United Nations, “*Human Development Index*,” Human Development Reports (United Nations), 2024
- Vitalaya, “Pemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan” *Makalah pada acara Sarasehan dan Kongres LEI Menuju CBO : Sertifikasi Di Simpang Jalan: Politik Perdagangan, Kelestarian dan Pemberantasan Kemiskinan*, Jakarta, 2020.
- Yudawisastra and dkk, *Metodologi Penelitian* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023).
- Zakaria and dkk, *PENGANTAR EKONOMI (Mikro Dan Mikro)* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022).
- Zulaika Matondang and Hamni Fadillah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews & SPSS* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Zulhijjah Putri
Nim : 2140200028
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan Jae, 19 Februari 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Panyabungan jae, Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara
Telepon/Hp : 087749071582
E-mail : zaap1439@gmail.com

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SD Negeri 090 Panyabungan
Tahun 2015-2018 : SMP Negeri 1 Panyabungan
Tahun 2018-202 : SMA Negeri 1 Panyabungan
Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

III. ORANG TUA

Nama Ayah : Sarman
Nama Ibu : Rosliana
Pekerjaan : Petani
Alamat : Panyabungan jae, Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara

IV. ORGANISASI

- Sekertaris Umum HMP ES priode 2024-2025
- Pj. Sekertaris Umum DPP IMMAN Padangsidempuan 2023-2025
- Wakil Sekertaris Umum Mapasta Uin Syahada 2024-2025
- Bendahara Umum Forum Paguyuban Nusantara Madina 2024-
Sekarang

MOTTO

~Kunci kesuksesan adalah tanggung jawab~

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al- Insyirah : 5-6)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan.”

(Nadin Amizah)

Lampiran 1

Tabel Data Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian (Dalam Milyar Rupiah)

No	Provinsi	PDRB Sektor Pertanian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	37.899,52	37.768,08	39.005,09	41.626,32	42.121,37
2	Sumatera Utara	136.327,03	141.601,18	148.721,97	153.237,64	158.952,63
3	Sumatera Barat	37.993,39	38.820,71	40.188,63	41.612,83	42.467,74
4	Riau	135.124,21	140.717,74	144.691,04	149.361,11	152.698,39
5	Jambi	39.751,94	41.209,13	43.268,38	45.697,30	47.640,38
6	Sumatera Selatan	53.281,53	54.834,53	56.926,73	58.154,46	59.660,28
7	Bengkulu	12.795,99	13.109,72	13.699,33	13.981,68	14.341,27
8	Lampung	68.312,25	68.679,69	69.317,66	69.691,04	68.236,77
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.443,74	16.887,33	18.274,05	19.996,71	21.786,46
10	Kepulauan Riau	5.466,78	5.322,05	5.601,86	5.687,63	5.720,17
11	DKI Jakarta	1.405,10	1.463,34	1.501,26	1.442,05	1.516,60
12	Jawa Barat	107.000,79	108.406,55	113.186,39	113.308,54	115.104,77
13	Jawa Tengah	126.111,76	127.065,84	130.762,52	131.346,27	133.194,10
14	DI Yogyakarta	8.534,64	8.638,19	9.077,78	9.169,84	9.177,04
15	Jawa Timur	167.631,24	170.556,77	173.747,56	177.668,87	177.789,80
16	Banten	25.275,08	25.416,58	26.490,53	26.532,32	26.703,40
17	Bali	21.269,19	21.338,45	21.157,30	21.039,32	21.579,83
18	Nusa Tenggara Barat	21.466,10	21.712,18	22.187,32	8.276,74	22.992,21
19	Nusa Tenggara Timur	18.680,64	19.601,90	20.341,73	20.842,30	21.207,73
20	Kalimantan Barat	32.371,35	33.811,57	34.547,57	35.108,57	36.150,73
21	Kalimantan Tengah	21.304,92	22.073,16	22.834,25	23.837,49	24.148,44
22	Kalimantan Selatan	18.399,41	18.614,34	18.911,08	19.537,27	20.350,74
23	Kalimantan Timur	33.026,69	33.003,90	33.712,58	34.551,17	35.372,74
24	Kalimantan Utara	10.925,64	11.300,51	11.723,08	12.229,93	12.444,24
25	Sulawesi Utara	17.705,45	18.040,14	19.187,16	20.044,50	21.113,98
26	Sulawesi Tengah	42.961,69	46.500,06	51.206,64	54.803,20	59.567,55
27	Sulawesi Selatan	66.139,90	70.357,80	72.162,73	72.226,30	75.166,74

28	Sulawesi Tenggara	21.728,37	22.247,11	23.754,98	24.779,74	25.734,91
29	Gorontalo	10.478,78	10.663,64	10.907,95	11.365,50	11.719,48
30	Sulawesi Barat	12.761,98	12.910,29	13.337,56	13.878,84	14.542,85
31	Maluku	7.353,71	7.409,16	7.833,24	8.276,74	8.557,58
32	Maluku Utara	5.594,84	5.727,23	5.911,57	6.162,71	6.440,92
33	Papua Barat	-	-	-	2.834,43	2.849,11
34	Papua	16.490,61	16.755,83	17.135,86	7.017,87	7.073,68

Tabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Dalam %)

No	Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	78,99	74,71	73,55	78,53	74,76
2	Sumatera Utara	69,90	71,15	74,11	72,80	75,05
3	Sumatera Barat	79,33	73,58	74,98	75,85	74,07
4	Riau	69,41	70,72	72,10	70,42	75,97
5	Jambi	70,87	69,04	72,12	68,15	73,16
6	Sumatera Selatan	69,71	69,70	72,12	70,20	75,05
7	Bengkulu	69,92	71,46	70,82	72,10	72,69
8	Lampung	67,46	68,56	69,10	69,91	62,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,50	72,05	71,67	71,62	56,09
10	Kepulauan Riau	70,51	73,19	74,17	74,26	72,69
11	DKI Jakarta	52,98	54,43	54,65	54,57	69,46
12	Jawa Barat	59,40	62,68	64,66	64,77	68,44
13	Jawa Tengah	67,62	66,27	66,85	68,59	71,24
14	DI Yogyakarta	66,65	65,66	65,96	66,29	75,00
15	Jawa Timur	67,07	68,29	69,92	69,59	73,18
16	Banten	59,37	64,14	63,41	62,52	56,39
17	Bali	71,99	70,70	70,89	71,38	75,00
18	Nusa Tenggara Barat	70,83	69,89	70,56	71,92	73,12
19	Nusa Tenggara Timur	73,28	74,97	73,49	74,18	73,18
20	Kalimantan Barat	70,07	72,90	71,90	73,73	72,80
21	Kalimantan Tengah	72,74	75,11	76,62	75,17	74,80
22	Kalimantan Selatan	68,43	71,03	71,97	73,50	74,05
23	Kalimantan Timur	76,46	75,06	74,46	75,47	78,59
24	Kalimantan Utara	78,49	80,85	80,67	80,77	75,59
25	Sulawesi Utara	70,69	72,38	72,37	73,87	76,26
26	Sulawesi Tengah	77,53	77,78	78,66	79,93	79,14
27	Sulawesi Selatan	70,70	73,23	73,14	74,30	80,14
28	Sulawesi Tenggara	72,82	74,97	76,88	78,41	78,59
29	Gorontalo	75,31	77,32	79,79	79,52	76,26
30	Sulawesi Barat	73,60	75,72	76,77	78,05	75,70

31	Maluku	75,98	78,23	77,69	78,75	83,75
32	Maluku Utara	74,71	77,45	78,84	80,36	83,75
33	Papua Barat	78,65	81,80	84,22	83,31	81,62
34	Papua	79,75	80,23	81,46	81,31	81,81
	Indonesia	70,27	71,45	72,42	72,54	72,70

Tabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (Dalam Milyar Rupiah)

No	Provinsi	DBH – SDA KEHUTANAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	0,37	1,66	0,79	1,16	0,92
2	Sumatera Utara	15,36	27,67	25,12	16,94	11,11
3	Sumatera Barat	4,84	13,50	5,96	8,79	11,64
4	Riau	110,69	280,28	213,43	202,00	203,33
5	Jambi	23,80	82,86	55,68	47,83	13,10
6	Sumatera Selatan	34,83	119,28	94,20	68,32	89,10
7	Bengkulu	0,60	0,85	0,62	0,99	0,94
8	Lampung	1,73	8,84	4,18	9,03	6,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,20	0,52	0,27	0,12	0,08
10	Kepulauan Riau	0,85	1,05	0,70	0,43	0,75
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	4,16	10,25	8,62	7,27	6,08
13	Jawa Tengah	17,67	47,74	39,22	30,23	33,08
14	DI Yogyakarta	0,88	0,53	0,34	0,44	0,35
15	Jawa Timur	18,11	46,15	38,48	34,42	33,70
16	Banten	0,83	2,99	1,70	2,08	0,26
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1,60	2,53	1,14	2,14	3,15
19	Nusa Tenggara Timur	0,08	0,23	0,02	0,03	0,01
20	Kalimantan Barat	18,82	40,96	20,34	34,71	24,40
21	Kalimantan Tengah	122,60	281,17	157,27	169,68	273,27
22	Kalimantan Selatan	27,97	8,84	3,66	11,68	10,63
23	Kalimantan Timur	114,74	248,99	146,18	167,57	214,06
24	Kalimantan Utara	11,60	118,83	62,26	55,69	73,60
25	Sulawesi Utara	0,16	0,54	0,06	0,53	
26	Sulawesi Tengah	3,59	6,94	4,25	4,89	6,64
27	Sulawesi Selatan	0,86	2,18	2,40	13,11	1,34
28	Sulawesi Tenggara	1,14	4,39	1,88	5,19	5,30
29	Gorontalo	0,78	2,47	0,65	2,88	0,26
30	Sulawesi Barat	0,23	0,81	0,09	0,50	0,58
31	Maluku	25,27	39,33	17,44	21,50	39,41
32	Maluku Utara	10,34	25,87	6,75	9,64	19,45
33	Papua Barat	91,28	157,26	78,19	90,85	85,56

34	Papua	35,93	13,37	60,73	23,83	13,66
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel Data Indeks Pembangunan Manusia (Dalam %)

No	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	71,99	72,18	72,80	73,40	74,04
2	Sumatera Utara	71,77	72	72,71	73,37	74,02
3	Sumatera Barat	72,38	73,65	73,26	73,75	74,49
4	Riau	72,71	72,94	73,52	74,04	74,79
5	Jambi	71,29	71,63	72,14	72,77	73,43
6	Sumatera Selatan	70,01	70,24	70,90	71,62	72,30
7	Bengkulu	71,40	71,64	72,16	72,78	73,39
8	Lampung	69,69	69,90	70,45	71,15	71,81
9	Kepulauan Bangka Belitung	71,47	71,69	72,24	72,85	73,33
10	Kepulauan Riau	75,59	75,79	76,46	77,11	77,97
11	DKI Jakarta	80,77	81,11	81,65	82,46	83,08
12	Jawa Barat	72,09	72,45	73,12	73,74	74,43
13	Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	73,88
14	DI Yogyakarta	79,97	80,22	80,64	81,07	81,55
15	Jawa Timur	71,71	72,14	72,75	73,38	74,09
16	Banten	72,45	72,72	73,32	73,87	74,48
17	Bali	75,50	75,69	76,44	77,10	77,76
18	Nusa Tenggara Barat	68,25	68,65	69,46	70,20	70,93
19	Nusa Tenggara Timur	65,19	65,28	65,9	66,68	67,39
20	Kalimantan Barat	67,66	67,90	68,63	69,41	70,13
21	Kalimantan Tengah	71,05	71,25	71,63	72,20	72,73
22	Kalimantan Selatan	70,91	71,28	71,84	72,50	73,03
23	Kalimantan Timur	76,24	76,88	77,44	78,20	78,83
24	Kalimantan Utara	70,63	71,19	71,83	72,49	73,02
25	Sulawesi Utara	72,93	73,30	73,81	74,36	75,03
26	Sulawesi Tengah	69,55	69,79	70,28	70,95	71,56
27	Sulawesi Selatan	71,93	72,24	72,82	73,46	74,05
28	Sulawesi Tenggara	71,45	71,66	72,23	72,79	73,48
29	Gorontalo	68,68	69	69,81	70,45	71,23
30	Sulawesi Barat	66,11	66,36	66,92	67,55	68,20
31	Maluku	69,49	69,71	70,22	70,94	71,57
32	Maluku Utara	68,49	68,76	69,47	70,21	71,03
33	Papua Barat	65,09	65,26	65,89	66,66	67,02
34	Papua	60,44	60,62	61,39	62,25	73
	Indonesia	71,94	72,29	72,91	73,55	74,20

Tabel Data Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Hektar)

NO	Provinsi	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1,078,00	1,267,00	3,716,00	1.936,86	7,257,35
2	Sumut	3,744,00	4,078,00	7,516,00	2,113,75	7,032,27
3	Sumbar	1,573,00	2,068,00	9,832,00	4,885,13	3,052,20
4	Riau	15,442,00	8,970,00	4,915,00	7,267,03	11,027,96
5	Jambi	1,002,00	540,00	918,00	6,539,68	5,636,69
6	Sumsel	950,00	5,245,00	3,723,00	132,082,86	3,052,20
7	Bengkulu	221,00	93,00	1,620,00	75,94	355,05
8	Lampung	1,358,00	5,411,00	7,989,00	6,506,00	13,242,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	576,00	385,00	328,00	4,752,98	2,915,46
10	Kepulauan Riau	15,442,00	8,970,00	4,915,00	7,267,03	11,027,96
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
12	Jabar	2,344,00	1,299,00	2,005,00	11,524,80	4,548,58
13	Jateng	7,516,00	599,00	107,00	9,965,59	3,725,63
14	DI Yogyakarta	181,00	0,00	0,00	119,91	51,91
15	Jatim	19,148,00	15,458,00	2,380,00	49,498,32	20,957,17
16	Banten	2,00	0,00	0,00	1,01	362,83
17	Bali	29,00	3,00	0,00	2,011,27	316,36
18	NTB	29,157,00	101,173,00	30,567,00	66,716,43	46,189,73
19	NTT	114,719,00	137,343,00	70,637,00	102,536,89	113,089,51
20	Kalbar	7,646,00	20,590,00	21,836,00	111,848,43	24,154,63
21	Kalteng	7,681,00	3,653,00	1,554,00	165,896,44	11,459,89
22	Kalimantan Selatan	4,017,00	8,625,00	429,00	190,394,58	4,993,88
23	Kaltim	5,221,00	3,029,00	373,00	39,494,41	22,570,50
24	Kaltara	1,721,00	1,678,00	370,00	796,36	2,429,21
25	Sulut	177,00	579,00	469,00	2,531,44	651,68
26	Sulteng	2,555,00	3,133,00	3,704,00	10,844,28	4,920,70
27	Sulsel	1,902,00	916,00	997,00	6,489,26	3,522,91
28	Sultara	3,206,00	2,124,00	3,098,00	18,736,47	1,629,74
29	Gorontalo	80,00	163,00	101,00	666,33	767,03
30	Sulbar	569,00	886,00	488,00	2,132,31	994,74
31	Maluku	20,270,00	11,807,00	14,954,00	45,999,39	13,404,83
32	Maluku Utara	59,00	108,00	171,00	542,18	102,57
33	Papua Barat	5,716,00	77,00	1,738,00	259,03	198,85
34	Papua	28,277,00	15,979,00	8,336,00	604,01	544,19
35	Papua Barat Daya	-	-	-	504,24	28,42
36	Papua Selatan	-	-	-	150,813,34	27,182,19
37	Papua	-	-	-	2,593,91	104,02

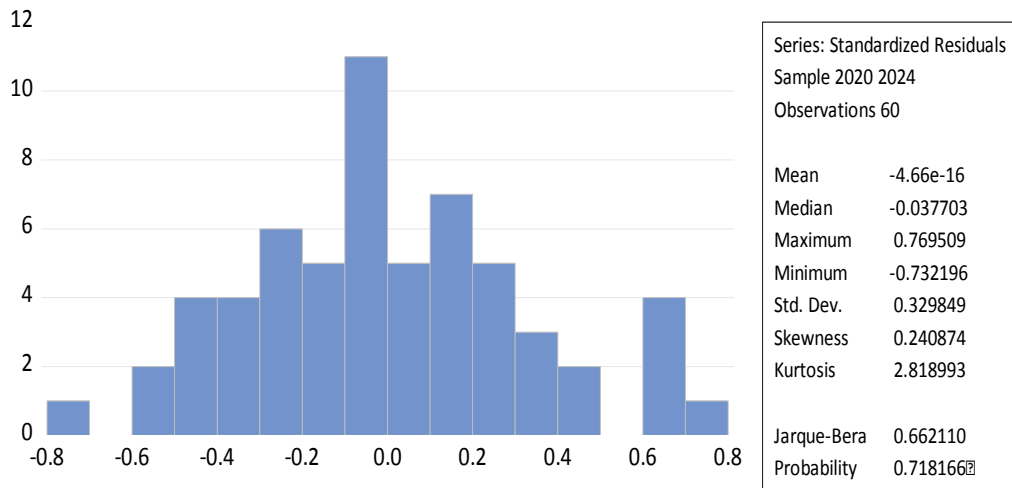
	Tengah					
38	Papua Pegunungan	-	-	-	787,11	461,56
	Indonesia	296,942,00	358,867,00	204,894,00	1,161,192,90	376,805

Lampiran

Tabel Statistik Deskriptif

	PDRB	IKLH	DBH	IPM
Mean	48008.13	74.00783	55.74462	72.17533
Median	28259.89	74.21500	18.46500	71.76000
Maximum	177789.8	83.75000	281.1700	78.83000
Minimum	5322.050	62.14000	0.260000	67.66000
Std. Dev.	53204.20	4.092851	79.47098	2.758539
Skewness	1.487586	-0.120061	1.538125	0.649487
Kurtosis	3.751470	3.049329	4.124566	2.730192
Sum	2880488.	4440.470	3344.677	4330.520
Sum Sq. Dev.	1.67E+11	988.3344	372622.6	448.9627
Observations	60	60	60	60

Gambar Hasil Uji Normalitas



Tabel Hasil Model Regresi *Common Effect*

Dependent Variable: LOG_PDRB
Method: Panel Least Squares

Date: 10/28/25 Time: 11:03
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.50035	5.882957	3.994649	0.0002
LOG_IKLH	-11.45434	1.837618	-6.233252	0.0000
LOG_DBH	0.198104	0.049860	3.973172	0.0002
LOG_IPM	1.146709	2.730809	0.419916	0.6762
R-squared	0.476134	Mean dependent var		4.446457
Adjusted R-squared	0.448070	S.D. dependent var		0.455728
S.E. of regression	0.338569	Akaike info criterion		0.736164
Sum squared resid	6.419229	Schwarz criterion		0.875787
Log likelihood	-18.08492	Hannan-Quinn criter.		0.790778
F-statistic	16.96585	Durbin-Watson stat		0.324660
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel Hasil Model Regresi *Fixed Effect*

Dependent Variable: LOG_PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/28/25 Time: 11:05
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
LOG_IKLH	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165
LOG_DBH	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
LOG_IPM	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999724	Mean dependent var	4.446457
Adjusted R-squared	0.999639	S.D. dependent var	0.455728
S.E. of regression	0.008663	Akaike info criterion	-6.447129
Sum squared resid	0.003377	Schwarz criterion	-5.923542
Log likelihood	208.4139	Hannan-Quinn criter.	-6.242325
F-statistic	11658.70	Durbin-Watson stat	0.948676
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel Model Regresi *Random Effect*

Dependent Variable: LOG_PDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/28/25 Time: 11:06
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.050835	0.424244	-2.476959	0.0163
LOG_IKLH	0.249648	0.102922	2.425618	0.0185
LOG_DBH	-0.002198	0.003185	-0.690232	0.4929
LOG_IPM	2.708830	0.228430	11.85844	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.344427	0.9994
Idiosyncratic random			0.008663	0.0006
Weighted Statistics				
R-squared	0.730222	Mean dependent var	0.050013	
Adjusted R-squared	0.715770	S.D. dependent var	0.017646	
S.E. of regression	0.009408	Sum squared resid	0.004956	
F-statistic	50.52608	Durbin-Watson stat	0.645074	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.018413	Mean dependent var	4.446457	
Sum squared resid	12.47919	Durbin-Watson stat	0.000256	

Tabel Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7771.357194	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	452.997549	11	0.0000

Tabel Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.036725	3	0.0046

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

	LOG IKLH	LOG DBH	LOG IPM
LOG_IKLH	1.000000	0.102654	0.096108
LOG_DBH	0.102654	1.000000	0.165116
LOG_IPM	0.096108	0.165116	1.000000

Tabel Hasil Uji Autokolerasi

Mean dependent var	4.446457
S.D. dependent var	0.455728
Akaike info criterion	-6.447129
Schwarz criterion	-5.923542
Hannan-Quinn criter.	-6.242325
Durbin-Watson stat	0.948676

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.999724
Adjusted R-squared	0.999639
S.E. of regression	0.008663
Sum squared resid	0.003377
Log likelihood	208.4139
F-statistic	11658.70
Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel Hasil Uji t-Statistik

Dependent Variable: LOG_PDRB
Method: Panel Least Squares
Date: 10/28/25 Time: 11:10
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
LOG_IKLH	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165
LOG_DBH	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
LOG_IPM	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000

Tabel Hasil Uji F-Statistik

R-squared	0.999724
Adjusted R-squared	0.999639
S.E. of regression	0.008663
Sum squared resid	0.003377
Log likelihood	208.4139
F-statistic	11658.70
Prob(F-statistic)	0.00000

Tabel Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG_PDRB
Method: Panel Least Squares
Date: 10/28/25 Time: 11:10
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
LOG_IKLH	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165
LOG_DBH	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
LOG_IPM	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000

Tabel Hasil Intercept *Fixed Effect*

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 10/12/25 Time: 22:17				
Sample: 2020 2024				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 12				
Total pool (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.060913	0.412637	-2.571059	0.0135
IKLH?	0.256434	0.102950	2.490861	0.0165

DBH?	-0.002346	0.003186	-0.736325	0.4654
IPM?	2.707517	0.228573	11.84530	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	0.132829			
_GORONTALO--C	-0.374401			
_JATIM--C	0.789222			
_KALBAR--C	0.149517			
_KALTENG--C	-0.081676			
_KALTIM--C	-0.001207			
_KALUT--C	-0.379375			
_KEPRIAU--C	-0.772900			
_LAMPUNG--C	0.425987			
_MALUKU--C	-0.528057			
_NTB--C	-0.054454			
_RIAU--C	0.694516			
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.007503	R-squared		0.999724
Mean dependent var	4.446457	Adjusted R-squared		0.999639
S.D. dependent var	0.455728	S.E. of regression		0.008663
Akaike info criterion	-6.447129	Sum squared resid		0.003377
Schwarz criterion	-5.923542	Log likelihood		208.4139
Hannan-Quinn criter.	-6.242325	F-statistic		11658.70
Durbin-Watson stat	0.948676	Prob(F-statistic)		0.000000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2794 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2025 22 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;

1. Zulaika Matondang, M.Si : Pembimbing I
2. Nur Halimah, M.E : Pembimbing II

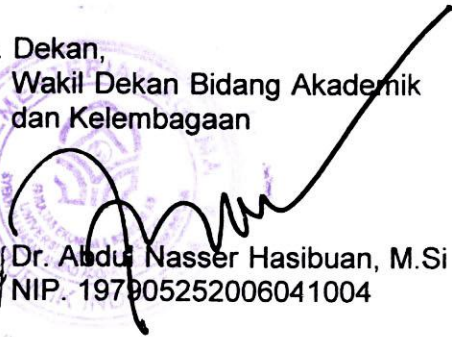
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Zulhijjah Putri
NIM : 2140200028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian di Indonesia.**

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.